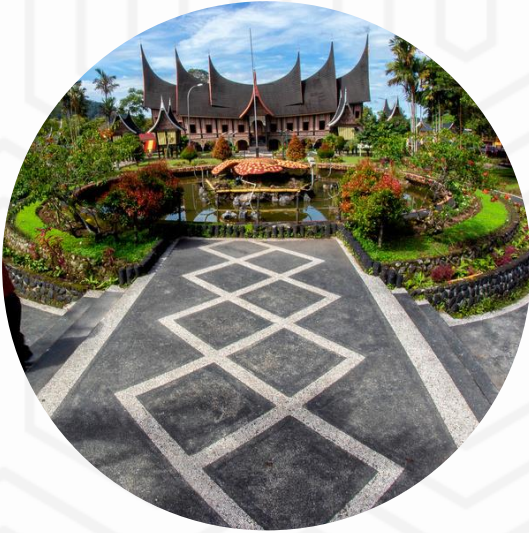




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**Lampiran XIV Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 19 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategi, arah kebijakan serta program pembangunan Disporapar selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta langkah-langkah implementasi yang terukur serta kerangka indikatif pendanaan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Disporapar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Disporapar.

Padang Panjang, September 2025
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

KOTA PADANG PANJANG



NURASRIZAL, ST.MT

Pembina Tk. I NIP. 19770829 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	29
2.1.5 Mitra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Pemberian Pelayanan	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	39
2.2.2 Isu Strategis	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029	47
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	63
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	93
BAB V PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi SDM berdasarkan jabatan pada Disporapar	21
Tabel 2.2	Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Disporapar	22
Tabel 2.3	Jumlah asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	22
Tabel 2.4	Capaian kinerja pelayanan Disporapar Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.5	Kelompok sasaran layanan Disporapar	30
Tabel 2.6	Mitra Disporapar	33
Tabel 2.7	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Disporapar	34
Tabel 2.8	Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Disporapar	35
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Disporapar	40
Tabel 2.10	Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Disporapar	44
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	50
Tabel 3.2	Perumusan Strategi berdasarkan isu strategis	54
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Disporapar	55
Tabel 3.4	Teknik merumuskan Arah Keijakan Renstra Disporapar	56
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Disporapar	65
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	81
Tabel 4.3	Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	90
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	93
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	20
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	47
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	53
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Disporapar (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Renstra tersebut disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 meliputi:

- 1. Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra**

Berupa pengolahan data dan informasi, perumusan pohon kinerja Disporapar yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif selama tahun periode Renstra, dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Menyempurnakan rancangan Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029.

3. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra diverifikasi akhir oleh Bappeda Kota Padang Panjang dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Selain itu juga disahkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan RPJMD pertama setelah penetapan RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang ini menjadi instrument pengawalan terhadap arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan Kepala Daerah Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4966);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 212);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
33. Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh unsur di lingkungan DISPORAPAR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun mendatang. Renstra ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.

Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi DISPORAPAR Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DISPORAPAR Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kota Padang Panjang;

2. Menyediakan dokumen perencanaan DISPORAPAR Kota Padang Panjang untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi DISPORAPAR Kota Padang Panjang;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi DISPORAPAR Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi DISPORAPAR Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DISPORAPAR Kota Padang Panjang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DISPORAPAR Kota Padang Panjang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DISPORAPAR Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kota Padang Panjang yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban DISPORAPAR Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kota Padang Panjang dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DISPORAPAR Kota Padang Panjang untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DISPORAPAR Kota Padang Panjang.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DISPORAPAR Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DISPORAPAR Kota Padang Panjang yang merupakan dokumen perencanaan DISPORAPAR Kota Padang Panjang tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah;
- c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah;
- g. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
- h. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- i. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- j. pengelolaan daya tarik wisata Daerah;
- k. pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- l. pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
- m. pengelolaan pemasaran daya tarik pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

- n. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- s. pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat
- 2. Bidang kepemudaan
- 3. Bidang olahraga
- 4. Bidang pariwisata
- 5. Bidang sarana dan prasarana
- 6. UPTD

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai pasal (4) ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas juga mempunyai fungsi sesuai pasal (4) ayat (2) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

- b. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah;
- c. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- f. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah;
- g. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
- h. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- i. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- j. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah;
- k. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- l. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
- m. Pengelolaan pemasaran daya tarik pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- n. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
- o. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- q. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- r. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) sebagai berikut:

- a. Perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- f. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- h. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- i. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- j. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- k. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
- l. Fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Bidang Kepemudaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (2) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman tagwa serta peningkatan kreativitas pemuda
- b. Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda
- i. Penyusunan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- j. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- k. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;

- l. Pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- n. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;
- o. Pengelolaann data, informasi dan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan;
- q. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Bidang Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan, pengembangan kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (8) ayat (2) sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi serta pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus kemitraan penghargaan olahraga;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;

- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Bidang Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kepariwisataan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (9) ayat (2) sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. Penetapan destinasi pariwisata dan daya Tarik wisata Daerah;

- c. Penyusunan strategi pemasaran serta melaksanakan pemasaran pariwisata;
- d. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- e. Memverifikasi persyaratan teknis persetujuan penerbitan perizinan berusaha pariwisata;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi/atau asosiasi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- g. Pelaksanaan kajian dan kerjasama pemasaran objek wisata dan daya tarik wisata dengan pihak ketiga;
- h. Pemasaran pariwisata, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- i. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif Daerah;
- j. Penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada bidang pariwisata;
- l. Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang pariwisata; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana yang dikepalai oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga, dan pariwisata;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana pemuda olahraga, dan kemitraan pemuda olahraga;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana pemuda olahraga, dan kemitraan pemuda olahraga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

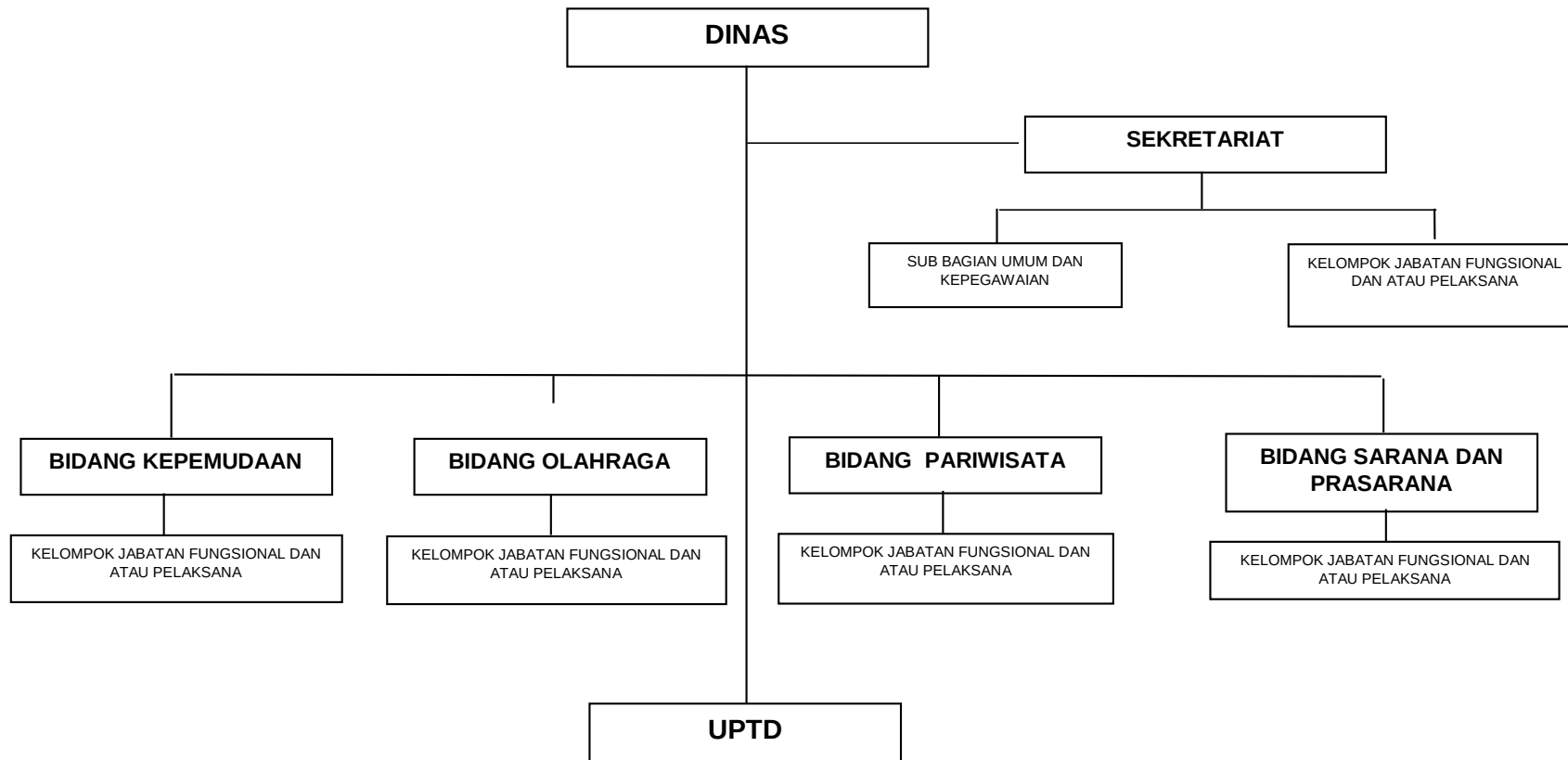
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dikepalai oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas dapat dibentuk UPTD. Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Saat ini Sumber daya Manusia (SDM) Disporapar Kota Padang Panjang sebanyak 26 Orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kondisi Kepegawaian pada Disporapar Kota Padang Panjang
Komposisi SDM berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1. :

Tabel 2.1			
Komposisi SDM berdasarkan Jabatan pada Disporapar			
No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	4	Pelaksana Tugas 1 orang
3	Eselon IV	1	
4	Pejabat fungsional	10	Kosong 1 Orang
5	Staf/Non Eselon	10	13 Orang
Jumlah		26	

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Secara keseluruhan, dengan total hanya 26 orang, kapasitas SDM Disporapar Kota Padang Panjang dapat dikategorikan masih terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Sedangkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Disporapar

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	1	
2	Sarjana S-1	19	
3	Diploma -3	4	
4	Diploma -2	1	
5	SLTA	1	
Jumlah		26	

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah SDM dengan latar belakang **Sarjana S-1 sebanyak 19 orang** atau sekitar **73% dari total SDM (26 orang)**. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM Disporapar memiliki kualifikasi akademik yang cukup tinggi, yang dapat mendukung pelaksanaan tugas strategis, administrasi, maupun teknis secara efektif. Untuk pascasarjana masih minim hanya terdapat 1 orang dengan gelar sarjana S-2 (Magister), yaitu sekitar 3,8 dari total SDM. Ini menunjukkan masih terbatasnya tenaga ahli yang memiliki spesialisasi atau kompetensi lanjutan, yang bisa menjadi perhatian jika organisasi ingin mengembangkan kapasitas riset, inovasi atau kepemimpinan stategis jangka panjang.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Disporapar Kota Padang Panjang

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Disporapar sebagai pendukung tugas fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Meja ½ Biro	1	2.951.000	2001
2	Sepeda Motor	1	7.700.000	2002
3	Sepeda Motor	1	9.500.000	2002
4	Meja ½ Biro	1	6.804.000	2002
5	Meja ½ Biro	1	2.268.000	2002
6	Station Wagon	1	110.000.000	2003

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Meja ½ Biro	1	2.951.000	2001
7	Filing Cabinet Besi	1	3.780.000	2004
8	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	2.764,500	2004
9	Sepeda Motor	1	9.100.000	2005
10	Lemari Kayu	1	3.780.000	2005
11	Lemari Kayu	2	5.880.000	2005
12	Lemari Kaca	1	1.418.000	2005
13	Alat kantor lainnya	1	11.382.000	2005
14	Meja tambahan	1	1.890.000	2005
15	Meubeleur lainnya	1	15.120.000	2005
16	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	2.900.000	2005
17	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inchi)	1	2.250.000	2006
18	Alat kantor lainnya	1	1.498.000	2006
19	Alat Rumah Tangga Lain;lain	1	3.375.000	2006
20	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2.450.000	2006
21	Rak kayu	1	1.000.000	2007
22	Kasus/Spring Bed	15	14.190.000	2007
23	Kursi Tamu	1	3.120.000	2007
24	Sofa	1	9.590.000	2007
25	Mesin Pemotong Rumput	1	2.550.000	2007
26	Mesin Pemotong Rumput	1	2.550.000	2007
27	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	851.8	2007
28	Kompore Gas (Alat Dapur)	4	3.407.200	2007
29	Televisi	3	15.450.000	2007
30	Televisi	1	5.150.000	2007
31	Unit Power Supply	1	2.450.000	2007
32	Unit Power Supply	1	2.450.000	2007
33	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5	7.475.000	2007
34	Handy Talky (HT)	1	1.482.500	2007
35	P.C Unit	1	19.900.000	2008
36	Note Book	1	22.300.000	2008
37	Papan Pengumuman	1	96.626.000	2009
38	Alat Kantor Lainnya	1	2.400.000	2009
39	Alat Kantor Lainnya	1	11.500.000	2009
40	Meja 1/2 Biro	8	9.400.000	2009
41	Mesin Cuci	1	6.809.000	2009
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1.750.000	2009
43	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	5.900.000	2009
44	P.C Unit	1	10.000.000	2009
45	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	3.392.000	2010

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Meja ½ Biro	1	2.951.000	2001
46	Megaphone	1	1.315.000	2010
47	Camera Video	1	3.054.000	2010
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.750.000	2010
49	Handy Talky (HT	1	2.975.000	2010
50	Facsimile	1	1.570.000	2010
51	Wireless Amplifier	1	8.740.000	2010
52	Generator Set(Lab Scale)	11	13.900.000	2010
53	P.C Unit	1	9.350.000	2010
54	P.C Unit	1	11.200.000	2010
55	Note Book	1	13.900.000	2010
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.700.000	2010
57	Mesin Gergaji	1	1.800.000	2011
58	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	1	8.000.000	2011
59	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	7.150.000	2011
60	Lemari Kayu	1	9.900.000	2011
61	Alat Kantor Lainnya	2	7.800.000	2011
62	Meja 1/2 Biro	1	19.800.000	2011
63	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	4.796.000	2011
64	Alat Dapur lainnya	1	61.750.000	2011
65	Unit Power Supply	1	4.000.000	2011
66	Layar Film/Projector	1	12.800.000	2011
67	P.C Unit	1	9.975.000	2011
68	Note Book	1	3.680.000	2011
69	Sepeda Motor	3	38.465.400	2012
70	Lemari Kayu	1	6.000.000	2012
71	Filing Cabinet Besi	1	2.950.000	2012
72	Mesin Absensi	1	5.957.000	2012
73	Papan Pengumuman	1	9.950.000	2012
74	Tempat Tidur Kayu	5	10.075.000	2012
75	Meja Tambahan	3	4.500.000	2012
76	Sofa	1	5.000.000	2012
77	Televisi	1	6.200.000	2012
78	Sound System	1	96.000.000	2012
79	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	8.275.000	2012
80				2012
81	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	13.800.000	2012
82	Camera Tune Simulator	1	9.000.000	2012
83	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	1	25.000.000	2012
84	Generator Set(Lab Scale)	1	67.300.000	2012

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Meja ½ Biro	1	2.951.000	2001
85	P.C Unit	1	17.500.000	2012
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.800.000	2012
87	Lemari Kayu	1	12.068.180	2013
88	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	6.284.090	2013
89	P.C Unit	1	10.000.000	2013
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.740.000	2013
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.000.000	2013
92	Station Wagon	1	192.270.000	2014
93	Sepeda Motor	1	16.744.000	2014
94	Sepeda Motor	1	16.744.000	2014
95	Filing Cabinet Besi	1	7.550.000	2014
96	Televisi	1	21.500.000	2014
97	Loudspeaker	2	22.610.000	2014
98	Compact Disc	1	1.000.000	2014
99	Megaphone	1	1.235.000	2014
100	Microphone	1	7.165.000	2014
101	Audio Amplifier	1	4.740.000	2014
102	Audio Master Control Unit	1	12.945.000	2014
103	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	835.000	2014
104	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	11.140.000	2014
105	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	840.000	2014
106	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	1.030.000	2014
107	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	795.000	2014
108	Stabilizing Amplifier	1	5.275.000	2014
109	Handy Talky (HT)	1	2.000.000	2014
110	P.C Unit	1	11.000.000	2014
111	Lap Top	1	28.500.000	2014
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.000.000	2014
113	Lemari Besi/Metal	2	6.500.000	2015
114	Rak Besi	1	1.000.000	2015
115	Filing Cabinet Besi	3	10.500.000	2015
116	Papan Visual/Papan Nama	3	6.000.000	2015
117	Papan Visual/Papan Nama	1	2.000.000	2015
118	Peta	2	4.000.000	2015
119	Mesin Absensi	1	6.407.000	2015
120	Sofa	1	12.300.000	2015
121	Meubeleur lainnya	10	7.500.000	2015
122	Meubeleur lainnya	1	1.800.000	2015
123	Televisi	2	8.000.000	2015

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Meja ½ Biro	1	2.951.000	2001
124	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	13.630.000	2015
125	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	7.250.000	2015
126	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.450.000	2015
127	Handy Talky (HT)	6	15.000.000	2015
128	alat komunikasi	2	11.740.000	2015
129	alat komunikasi	1	1.500.000	2015
130	switcher/menara antena lainnya (dst)	1	1.950.000	2015
131	switcher/menara antena lainnya (dst)	1	1.950.000	2015
132	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	2	31.500.000	2015
133	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	5.946.790	2016
134	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.973.000	2016
135	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	9.776.930	2016
136	Alat Kantor Lainnya	1	20.319.520	2016
137	Alat Kantor Lainnya	6	14.423.490	2016
138	Sound System	1	19.510.520	2016
139	Camera Video	1	31.034.650	2016
140	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	34.466.420	2016
141	Tripod Camera	1	1.716.160	2016
142	Lensa Kamera	1	16.467.890	2016
143	Lensa Kamera	1	7.296.230	2016
144	Komputer Jaringan lainnya	4	40.276.920	2016
145	Komputer Jaringan lainnya	3	17.890.770	2016
146	Lap Top	4	33.216.360	2016
147	Lap Top	3	49.771.630	2016
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	17.638.790	2016
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	19.301.880	2016
150	Station Wagon	1	255.623.330	2017
151	Mesin Absensi	1	3.817.000	2017
152	Rambu Jalan	1	42.630.000	2017
153	Alat Penghancur Kertas	1	2.460.000	2018
154	Tiang Bendera	1	5.775.000	2018
155	Karpet	1	41.965.000	2018
156	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	13.420.000	2018
157	Mini Komputer	1	9.856.200	2018
158	Filing Cabinet Besi	1	2.500.000	2019
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.000.000	2019
160	Rambu Jalan	1	93.883.250	2019
161	Pompa Air	1	6.000.000	2020

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Meja ½ Biro	1	2.951.000	2001
162	Meja Makan Besi	15	37.500.000	2020
163	Mesin Pemotong Rumput	4	19.700.000	2020
164	Alat Rumah Tangga Lain-lai	2	10.600.000	2020
165	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	2	83.396.000	2020
166	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	7	73.716.760	2020
167	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	2	84.118.720	2020
168	CCTV - Camera Control Television System	2	29.873.000	2021
169	Kursi Putar	4	6.760.000	2021
170	Kursi Putar	4	7.600.000	2021
171	P.C Unit	1	16.960.000	2021
172	Lap Top	2	35.400.000	2021
173	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	6.300.000	2021
174	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	10.750.000	2021
175	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	11	139.781.930	2021
176	Mesin Pemotong Rumput	1	4.000.000	2022
177	Mesin Pemotong Rumput	1	4.700.000	2022
178	Lap Top	1	36.750.000	2022
179	Loudspeaker	1	4.028.900	2023
180	Alat Tennis Mej	2	9.600.000	2023
181	Transportable Generating Set	1	457.000.000	2024
182	Pick Up	1	177.000.000	2024
183	Mesin Absensi	1	3.000.000	2024
184	Papan Nama Instansi	1	49.400.000	2024
185	Meja 1/2 Biro	1	2.700.000	2024
186	Kursi Putar	1	1.910.000	2024
187	Mesin Pel/Poles	1	10.482.290	2024
188	Karpet	10	30.000.000	2024
189	Lap Top	1	16.200.000	2024
190	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	16.110.000	2024

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Disporapar telah melakukan pengadaan aset sejak tahun 2001 hingga 2024 dengan jumlah dan jenis yang sangat beragam, mulai dari **mebel kantor, kendaraan dinas, alat elektronik, hingga**

peralatan rumah tangga dan studio . Secara umum seluruh aset yang ada di Disporapar termamfaatkan dengan baik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Disporapar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Data Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.19	0.246	0.247	0.67	0.89
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.559	1.878	1.894	0.56	0.5
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	orang	0	1	1	62	10
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-41213	-99.288	4562.5	3.09	27,01
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	%	-78.984	129.842	50.444	22.19	19,72
6	Tingkat Hunian Akomodasi		1,403	6411.556	9392.14	33.26	24,17
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		36.44	2.75	2,82	2.81	2,88
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	188,979,000.00	172,874,000.00	204,500,000.000	2.08	2,41

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Berdasarkan data yang disajikan capaian kinerja pelayanan Disporapar Kota Padang Panjang pada periode 2020–2024 secara umum menunjukkan perkembangan yang

positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri mengalami Trend Positif: Naik konsisten dari 0.19% (2020) menjadi 0.89% (2024).
- Partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial bersifat Fluktuatif: Tertinggi di 2022 (1.894%) namun turun tajam ke 0.5% di 2024.
- Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami lonjakan di 2023 (62 orang), namun menurun di 2024 (10 orang).
- Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara tidak stabil: Dari angka negatif ekstrem (-41.213% di 2020) ke +4562.5% (2022), lalu hanya 3.09% di 2023. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 (2020–2021), pemulihan besar di 2022.
- Pertumbuhan Wisatawan Nusantara tidak stabil pada tahun 2021 (129.842%), turun terus sampai 22.19% di 2023. Sama dengan wisatawan mancanegara, Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 (2020–2021), pemulihan besar di 2022..
- Tingkat Hunian Akomodasi bersifat fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan
- Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB mengalami naik, turun, efek dari pandemic covid 19
- Kontribusi Pariwisata terhadap PAD bersifat fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan, efek dari pandemic COVID-19

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai kelompok sasaran layanan sebagai penerima layanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Secara lebih rinci kelompok sasaran layanan Disporapar dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Layanan Disporapar

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
1	Kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	KNPI, Pramuka
2	Olahraga	Pembinaan Keolahragaan	KONI, masyarakat
3	Pariwisata	PDIKM, Lubuk Mata Kucing	Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Nusantara, HPI, Pokdarwis
4	Sarana dan Prasarana	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi objek wisata dan olahraga	Masyarakat

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kelompok sasaran layanan DISPORAPAR sebagai berikut:

1. Bidang Kepemudaan

Fokus utama pada pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dengan sasaran utama adalah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan Pramuka. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pengembangan kapasitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah, serta penguatan organisasi kepemudaan sebagai basis pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

2. Bidang Olahraga

Layanan pembinaan keolahragaan ditujukan kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan masyarakat umum. Hal ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi olahraga baik di tingkat organisasi formal maupun masyarakat luas, guna mendukung prestasi olahraga serta gaya hidup sehat.

3. Bidang Pariwisata

Sasaran pada bidang pariwisata sangat beragam, meliputi wisatawan mancanegara dan nusantara, serta organisasi dan komunitas pariwisata seperti HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Dengan menysasar berbagai pihak, ini memperlihatkan strategi pengembangan pariwisata yang inklusif, berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui ekowisata dan wisata budaya.

4. Bidang Sarana dan prasarana

Fokus pada pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi objek wisata, pemuda dan olahraga dengan sasaran utama masyarakat umum menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan tersedianya fasilitas yang memadai dan berkualitas. Ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas pariwisata, pemuda dan olahraga, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung serta warga lokal.

Program layanan DISPORAPAR 2025 mengadopsi pendekatan menyeluruh dengan memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (pemuda dan atlet), pengembangan industri pariwisata yang inklusif, dan penyediaan fasilitas pendukung. Hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan penciptaan daya tarik wisata yang berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Pemberian

Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis. Kemitraan ini mencakup instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, serta komunitas pemuda dan olahraga. Adapun mitra-mitra tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah

Dinas bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti:

- Dinas Pendidikan dalam pengembangan program kepemudaan di sekolah-sekolah.

- Dinas Kesehatan dalam mendukung kegiatan olahraga berbasis kesehatan masyarakat.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata lokal.

2. Organisasi Kepemudaan dan Olahraga

Kolaborasi juga dijalin dengan berbagai organisasi seperti:

- KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
 - KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
 - Pramuka, Karang Taruna, dan organisasi kepemudaan lainnya
 - Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll)
- Mitra ini berperan dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, pembinaan atlet, dan penyelenggaraan event olahraga.

3. Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Dinas menjalin kerja sama dalam bentuk:

- Program magang dan penelitian mahasiswa di bidang pemuda, olahraga, atau pariwisata.
- Pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kapasitas SDM.
- Kegiatan bersama dalam rangka promosi dan edukasi pariwisata daerah.

4. Pelaku Usaha dan Industri Pariwisata

Termasuk di dalamnya:

- Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal.
- Asosiasi pariwisata seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia).
- Mitra ini berperan dalam mendukung pengembangan destinasi wisata dan peningkatan pelayanan kepada wisatawan.

5. Media Massa dan Digital

Media menjadi mitra penting dalam:

- Publikasi dan promosi kegiatan dinas.
- Penyebaran informasi terkait program-program kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik.

6. Komunitas dan LSM

Banyak komunitas lokal yang menjadi mitra aktif, misalnya:

- Komunitas olahraga (seperti komunitas lari, sepeda, bela diri, dll.)
- Komunitas kreatif dan budaya yang mendukung promosi pariwisata.
- LSM yang fokus pada pemberdayaan pemuda dan pelestarian lingkungan wisata.

Tabel 2.6
Mitra Disporapar

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	KNPI, Kwarcab Pramuka, OKP, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KNPI, Kwarcab Pramuka, OKP, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KNPI, Kwarcab Pramuka, OKP, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KNPI, KWARCAB Pramuka, OKP, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KNPI, Kwarcab Pramuka, OKP, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	Sinergi dengan KNPI, Kwarcab Pramuka dalam hal pengembangan dan peningkatan daya saing kepemudaan	Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengolah masukan dari berbagai mitra
2	Pembinaan Keolahragaan	KONI, Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll), Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KONI, Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll), Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KONI, Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll), Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KONI, Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll), Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	KONI, Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll), Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan	Sinergi dengan KONI , Federasi atau asosiasi olahraga cabang tertentu (seperti PSSI, PBSI, dll) dalam hal pengembangan dan peningkatan daya saing keolahragaan	
3	PDIKM, Lubuk Mata Kucing	PHRI, HPI, ASITA, Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal. Media Massa dan Digital	PHRI, HPI, ASITA, Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal. Media Massa dan Digital	PHRI, HPI, ASITA, Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal. Media Massa dan Digital	PHRI, HPI, ASITA, Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal. Media Massa dan Digital	PHRI, HPI, ASITA, Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal. Media Massa dan Digital	Sinergi dengan PHRI, HPI, ASITA, Pengusaha hotel, restoran, travel agent, dan UMKM lokal. Media Massa dan Digital dalam hal pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi wisata	Bencana alam/Kondisi lingkungan, Keterbatasan infrastruktur, Kurangnya promosi, persaingan dengan destinasi baru

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi objek wisata dan olahraga	Kelurahan, Pokdarwis	Kelurahan, Pokdarwis	Kelurahan, Pokdarwis	Kelurahan, Pokdarwis	Kelurahan, Pokdarwis		
5	Pengembangan Ekraf	Pelaku Ekraf	Pelaku Ekraf	Pelaku Ekraf	Pelaku Ekraf	Pelaku Ekraf	Sinergi dengan pelaku ekraf dalam hal pengembangan ekraf	

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Keterkaitan antara BUMD dengan kinerja DISPORAPAR secara umum dapat digambarkan pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Disporapar

Disporapar No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Pariwisata	Penyediaan QRIS untuk pembayaran tiket masuk ke objek wisata.	Bank Nagari

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Kerjasama DISPORAPAR dengan Bank Nagari merupakan langkah strategis yang mendukung transformasi digital sektor pariwisata di Kota Padang Panjang. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan objek wisata, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Dukungan BUMD seperti ini perlu diperluas ke bidang lain seperti olahraga dan kepemudaan agar tercipta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tabel 2.8

Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Disporapar

No	Aspek>Nama Kerja Sama	Tahun						Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peminjaman buku koleksi Museum Bustanil Arifin	-	-	-	-	SMK 2 Padang Panjang	-	Kedua institusi memiliki kepentingan dalam mendukung peningkatan akses siswa SMK 2 Padang Panjang terhadap sumber daya edukasi yang ada di Museum Bustanul Arifin	Kekhawatiran kepastian keamanan dan kondisi buku selama masa peminjaman
								Mendukung proses belajar mengajar dan penelitian di SMK 2 Padang Panjang	
2	Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Tentang Peendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat		
3	Program Kuliah Umum Tahun 2025	-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Geografi yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	

No	Aspek>Nama Kerja Sama	Tahun						Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Sejarah yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	
5		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Sosiologi yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	
6		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan	

No	Aspek>Nama Kerja Sama	Tahun						Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	
7		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	
8		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Bimbingan dan konseling yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	

No	Aspek>Nama Kerja Sama	Tahun						Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		-	-	-	-	-	Program Studi IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi IPS yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	
10		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi PPKn yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	
11		-	-	-	-	-	Program Studi Pendidikan Humanitas Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat	Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Humanitas yaitu kompetensi dalam penerapan materi Kuliah umum sehingga dapat memahami konsep wisata berkelanjutan dan menganalisa risiko kebencanaan dalam destinasi wisata dan dapat memberikan pengalaman dan gambaran awal tentang dunia kerja	

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, maka Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang membantu Wali kota untuk mengemban kewenangan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah;
- c. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- f. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah;
- g. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
- h. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- i. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- j. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah;
- k. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- l. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
- m. Pengelolaan pemasaran daya tarik pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

- n. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
- o. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- q. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- r. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan (keterlibatan pemuda/OKP)	Belum optimalnya sarana dan prasarana kepemudaan	Belum menyediakan wadah yang efektif bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan kebijakan publik.
		Belum optimalnya daya saing kepemudaan	Kurangnya Akses Pendidikan dan Pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pemuda

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Rendahnya Kompetitifness dan Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda
			Rendahnya kompetitifness dan jiwa kepeloporan
2	Belum optimalnya prestasi keolahragaan	Belum optimalnya pembinaan keolahragaan	Masih kurangnya kapasitas pelatih yang punya kompetensi yang sesuai yang ditunjukkan dengan bersertifikasi
			Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas (atlet, pelatih dan staf pendukung lainnya)
		Belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan	Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan keolahragaan
3	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata	Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
			Kurangnya identifikasi potensi wisata lokal
			Kurangnya Konsep Pariwisata Berkelanjutan
			Masih rendahnya kualitas dan daya saing destinasi untuk menarik minat segmen pasar yang telah ada dan menarik minat kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas.
			Masih rendahnya pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata termasuk masih rendahnya Pembangunan aksesibilitas.

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Masih rendahnya potensi dan kapasitas sumberdaya masyarakat lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata
			Kurangnya Fokus pada Konsep Pariwisata Halal (Halal Tourism),
			Masih kurangnya pengembangan ekonomi kreatif yang mengacu kepada industri budaya local sebagai penguat pengembangan destinasi wisata
		Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Wisata	Kurangnya Identifikasi Potensi Wisata Lokal
			Kurangnya Pendekatan Keterlibatan Masyarakat
			Kurangnya Investasi dalam Pengembangan Potensi Wisata
4	Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata	Belum optimalnya pengembangan citra pariwisata	Masih kurangnya mengembangkan pola-pola pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, siergis, berkesinambungan dan berkelanjutan melalui pemerintah dan desination marketing, organization untuk target pasar domestic dan internasional
		Belum optimalnya promosi pariwisata	Masih rendahnya publikasi pemasaran pariwisata yang didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik.

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum optimalnya kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan.
			Kurangnya Pendekatan Keterlibatan Masyarakat
			Kurangnya Investasi dalam Pengembangan Potensi Wisata
			Masih rendahnya/ belum optimalnya ruang kreatif dengan penyelenggaraan even sebagai wadah pemasaran produk pariwisata dan produk ekonomi kreatif lainnya.

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Berdasarkan tabel pemetaan permasalahan pelayanan DISPORAPAR diatas dapat dijelaskan :

- Program kepemudaan belum menjawab kebutuhan aktual pemuda zaman sekarang. Tidak hanya soal fasilitas fisik, tetapi kurangnya penguatan kapasitas, orientasi kewirausahaan, dan pelibatan dalam pengambilan keputusan menjadi inti masalah. Hal ini mengakibatkan pemuda kurang terdorong untuk aktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.
- Kesenjangan antara target prestasi dan sumber daya pendukungnya. Pembinaan tidak berjalan maksimal karena pelatih tak tersertifikasi, dan minimnya fasilitas membuat potensi atlet tidak berkembang. Ketimpangan ini memperlemah pembibitan atlet daerah.
- Pengembangan destinasi wisata belum memiliki arah dan daya saing kuat.
- Pengembangan destinasi dilakukan tanpa perencanaan strategis jangka panjang. Potensi yang ada tidak diangkat secara sistematis, dan konsep pariwisata berkelanjutan belum menjadi pendekatan utama. Ini menyebabkan destinasi lemah dalam menarik wisatawan dan tidak memberikan dampak ekonomi signifikan pada masyarakat.

- Masalah promosi sangat terkait dengan keterpaduan strategi dan kelembagaan pemasaran. Tidak adanya peran yang kuat dari Destination Marketing Organization (DMO) dan promosi berbasis data membuat pemasaran tidak terarah. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif mempersempit jangkauan dampak promosi.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

Tabel 2.10
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Disporapar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peran dan fungsi organisasi kepemudaan (keterlibatan pemuda/OKP)	Belum Optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan (keterlibatan pemuda/OKP)		Tuntutan daya saing generasi muda dalam menghadapi MEA dan era digital	Pembangunan kepemudaan menuju (6) (7) Jumlah pemuda usia produktif relatif tinggi dan potensial untuk pembangunan Tuntutan daya saing generasi muda dalam	Kebutuhan kolaborasi lintas daerah dalam pengembangan kepemudaan	Meningkatkan peran aktif dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				menghadapi MEA dan era digital Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda		
Pembinaan dan prestasi keolahragaan	Belum optimalnya prestasi keolahragaan		Tren sport science dan sport industry sebagai ekonomi kreatif baru	Target peningkatan prestasi olahraga menuju tingkat nasional dan internasional	Persaingan prestasi olahraga antar daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga yang berdaya saing
Pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing		Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, wisata ramah lingkungan dan digital tourism	pembangunan pariwisata berkelanjutan serta peningkatan kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persaingan antar destinasi wisata di wilayah sekitar	Memperkuat pengembangan destinasi wisata unggulan yang kompetitif
Pengembangan pemasaran pariwisata	Belum optimalnya pengembangan pemasaran					Meningkatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata berbasis digital
Pengembangan ekonomi kreatif terkait pariwisata						Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, isu-isu strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran aktif dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah
Kurangnya keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan mengindikasikan perlunya strategi untuk memberdayakan dan melibatkan generasi muda secara lebih optimal dalam berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga yang berdaya saing

Prestasi olahraga yang belum merata dan belum optimalnya sistem pembinaan atlet memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengembangan potensi olahraga yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional

3. Memperkuat pengembangan destinasi wisata unggulan yang kompetitif

Prestasi olahraga yang belum merata dan belum optimalnya sistem pembinaan atlet memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengembangan potensi olahraga yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional

4. Meningkatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata berbasis digital

Promosi pariwisata yang masih bersifat konvensional memerlukan transformasi digital agar informasi wisata lebih mudah diakses dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama generasi milenial dan wisatawan mancanegara

5. Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata

Potensi ekonomi kreatif lokal belum tergarap maksimal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Diperlukan dukungan terhadap tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang sinergis dengan pengembangan pariwisata.

Secara keseluruhan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padang Panjang menghadapi tantangan utama dalam optimalisasi peran pemuda, peningkatan prestasi olahraga, serta pengembangan dan pemasaran pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Isu-isu tersebut berakar pada keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, strategi pemasaran, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif, inovatif, dan berbasis partisipasi aktif semua pihak, khususnya dalam memberdayakan pemuda dan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata.

BAB III

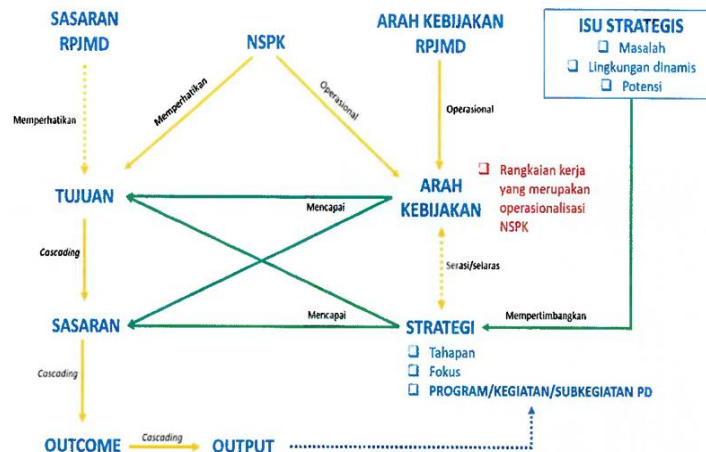
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 sesuai kaidah, penentuannya didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Secara singkat alurnya digambarkan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Visi Pembangunan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yakni: **“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah”**, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif
4. Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan

Untuk mendukung visi dan misi tersebut maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Misi ke-I yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi*)

Dalam mendukung misi 1, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berperan mengembangkan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga dan mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang pemuda dan olahraga.

Misi ke-II yakni Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal

Dalam mendukung misi 2, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai tugas mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kota Padang Panjang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan , serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	
			Rasio daya saing keolahragaan	%	29,76	30	31,48	32,14	32,27	32,88	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah			Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	2,94	2,998	3,056	3,114	3,172	3,23	
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5.38	5.6	5.82	6.03	6.15	6.26	
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda berwirausaha	orang	206	266	326	386	446	506

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif			Jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	160	180	200	220	240	260	
		Meningkatnya prestasi Olah Raga	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional	prestasi	75	78	85	90	95	97	
		Meningkatnya pengelolaan Pariwisata daerah	Lama tinggal wisatawan	hari	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
			Jumlah kunjungan wisatawan	Orang (ribu)	660	720	78	840	920	1.000	
		Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	5,00	5,56	6,02	6,38	6,67	6,88	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	69.19	71.29	73.38	75.48	77.57	79,67	

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi serta Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam fungsi perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Tujuan yang ditetapkan adalah :

➤ **Tujuan**

Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan

Dengan indikator kinerja :

- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- Rasio Daya Saing Keolahragaan
- Rasio PDRB Akomodasi Mamin
- Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

➤ **Sasaran**

Sasaran yang ditetapkan adalah:

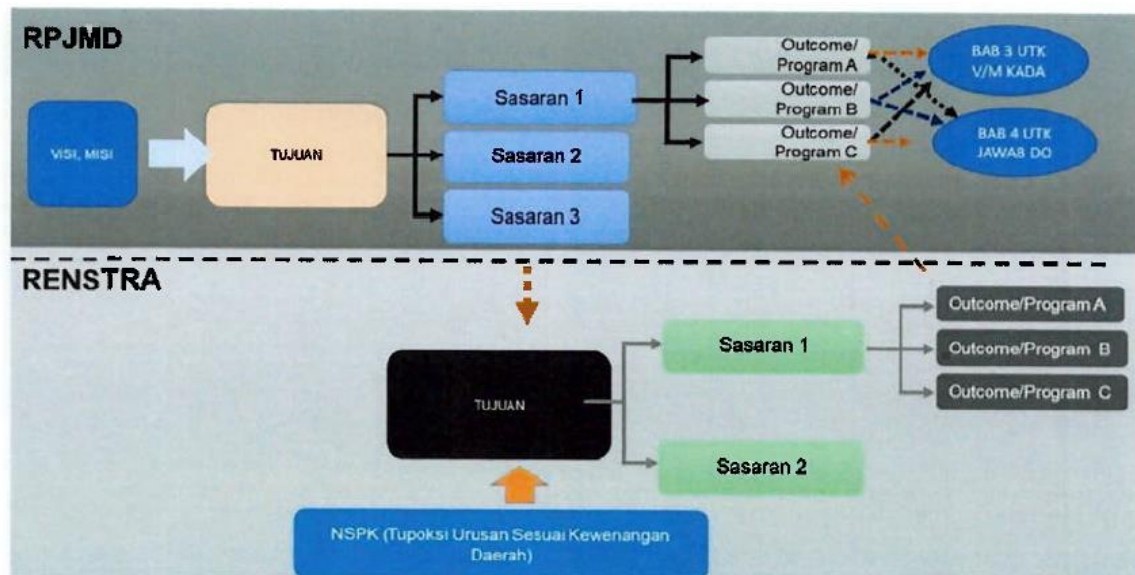
- ✓ Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, dengan indikator kinerja " Jumlah pemua berwirausaha", dan " Jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan"
- ✓ Meningkatnya prestasi olahraga, dengan indikator "Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional"
- ✓ Meningkatnya pengelolaan pariwisata daerah, dengan indikator "Lama tinggal wisatawan" dan "Jumlah kunjungan wisatawan"
- ✓ Pengembangan ekonomi kreatif, dengan indikator "Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif",

- ✓ Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator “Nilai AKIP Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata”

Secara keseluruhan tujuan dan sasaran yang dirumuskan ini merupakan upaya sistematis untuk Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memecahkan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disporapar Kota Padang Panjang.

Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
1	2	3
Meningkatkan peran aktif dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah	Pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre)	Kota Padang Panjang
	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan untuk Pemuda	Kota Padang Panjang
	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan	Kota Padang Panjang
Meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga yang berdaya saing	Penyelenggaraan event olah raga tahunan	Kota Padang Panjang
	Meningkatkan pembinaan terhadap olah raga berprestasi melalui penjangkaran dan pembinaan secara berjenjang (Talent Scouting)	Kota Padang Panjang
	Pemberian reward terhadap atlet berprestasi	Kota Padang Panjang
	Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
	Keikutsertaan dalam event olah raga	Kota Padang Panjang
	Peningkatan Kerjasama antara KONI dengan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Atlet	Kota Padang Panjang
	Peningkatan Kerjasama pembinaan karir Atlet	Kota Padang Panjang

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
1	2	3
Memperkuat pengembangan destinasi wisata unggulan yang kompetitif Meningkatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata berbasis digital Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata	Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing	Kota Padang Panjang
	Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan	Kota Padang Panjang
	Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Kota Padang Panjang
	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas	Kota Padang Panjang
	Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata	Kota Padang Panjang
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	Kota Padang Panjang
	Fasilitasi akses permodalan dan promosi bagi usaha ekonomi kreatif	Kota Padang Panjang

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra Disporapar Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Disporapar

TAHAP I (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemetaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penguatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penguatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Optimalisasi Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Keberlanjutan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Pemetaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penguatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penguatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Optimalisasi Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Keberlanjutan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Pemetaan Peningkatan Daya Tarik	Peningkatan Daya Tarik	Penguatan Peningkatan Daya Tarik	Penguatan Peningkatan Daya Tarik	Optimalisasi Penguatan Peningkatan Daya Tarik	Keberlanjutan Penguatan Peningkatan Daya Tarik

TAHAP I (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata
Pemetaan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Penguatan Pemasaran Pariwisata	Penguatan Pemasaran Pariwisata	Optimalisasi Pemasaran Pariwisata	Keberlanjutan Pemasaran Pariwisata
Pemetaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penguatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penguatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Keberlanjutan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Pemetaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Penguatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Penguatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Keberlanjutan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan arah kebijakan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Arah Kebijakan Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disporapar

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre)	Mendorong pembangunan dan pemanfaatan youth centre sebagai pusat inovasi, kreativitas, dan pengembangan kapasitas pemuda.	
2		Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan untuk Pemuda	Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan bagi pemuda.	

N0	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
3		Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dalam bentuk organisasi, forum diskusi, dan partisipasi dalam pembangunan lokal.	
4	Meningkatnya prestasi Olah Raga	Penyelenggaraan event olah raga tahunan	Menjadikan event olahraga tahunan sebagai ajang pencarian dan pengembangan bakat daerah.	
5		Meningkatkan pembinaan terhadap olah raga berprestasi melalui penjurangan dan pembinaan secara berjenjang (Talent Scouting)	Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga melalui sistem penjurangan atlet muda berbakat secara berjenjang.	
6		Pemberian reward terhadap atlet berprestasi	Mewujudkan apresiasi berkelanjutan untuk atlet berprestasi sebagai motivasi	
7		Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Padang Panjang	Memperluas dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas olahraga berbasis kebutuhan cabang olahraga unggulan.	
8		Keikutsertaan dalam event olah raga	Mendorong partisipasi atlet lokal dalam event olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional.	
9		Peningkatan Kerjasama antara KONI dengan Pemerintah Daerah	Memperkuat sinergi antara pemerintah, KONI, dan sekolah dalam pembinaan atlet muda.	
10		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Atlet	Menyusun sistem evaluasi terukur untuk keberlanjutan program pembinaan atlet.	
11		Peningkatan Kerjasama pembinaan karir Atlet	Mendorong adanya program pembinaan karir dan pendidikan bagi atlet setelah masa bertanding.	

N0	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
12	Meningkatnya pengelolaan Pariwisata daerah	Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing	- Menyusun master plan revitalisasi dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. - Meningkatkan daya tarik destinasi melalui peningkatan kualitas layanan, kebersihan, keamanan, dan atraksi lokal. - Mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.	
13		Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan	- Mengembangkan kalender event wisata tahunan yang konsisten dan menarik minat wisatawan. - Meningkatkan promosi pariwisata melalui platform digital, media sosial, kerja sama travel agent, dan media.	
14	Pengembangan ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Mendorong terbentuknya co-working space dan inkubator bisnis ekonomi kreatif di tingkat kota.	
15		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas	Mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis komunitas (kuliner, seni, musik, fashion, dll).	
16		Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata	Menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha pariwisata dan kreatif.	
17		Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	Menyelenggarakan program inkubasi dan mentoring untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif.	

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Disporapar Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah			
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi			
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre)	• Mendorong pembangunan dan pemanfaatan youth centre sebagai pusat inovasi, kreativitas, dan pengembangan kapasitas pemuda.
		Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Pemuda untuk	• Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan bagi pemuda.
		Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan	• Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dalam bentuk organisasi, forum diskusi, dan partisipasi dalam pembangunan lokal.
	Meningkatnya prestasi Olah Raga	Penyelenggaraan event olah raga tahunan	• Menjadikan event olahraga tahunan sebagai ajang pencarian dan pengembangan bakat daerah.
		Meningkatkan pembinaan terhadap olah raga berprestasi melalui penjaringan dan pembinaan secara berjenjang (Talent Scouting)	• Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga melalui sistem penjaringan atlet muda berbakat secara berjenjang.
		Pemberian reward terhadap atlet berprestasi	• Mewujudkan apresiasi berkelanjutan untuk atlet berprestasi sebagai motivasi

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah			
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi			
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Padang Panjang	• Memperluas dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas olahraga berbasis kebutuhan cabang olahraga unggulan.
		Keikutsertaan dalam event olah raga	• Mendorong partisipasi atlet lokal dalam event olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional.
		Peningkatan Kerjasama antara KONI dengan Pemerintah Daerah	• Memperkuat sinergi antara pemerintah, KONI, dan sekolah dalam pembinaan atlet muda.
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Atlet	• Menyusun sistem evaluasi terukur untuk keberlanjutan program pembinaan atlet.
		Peningkatan Kerjasama pembinaan karir Atlet	• Mendorong adanya program pembinaan karir dan pendidikan bagi atlet setelah masa bertanding.
	Meningkatnya pengelolaan Pariwisata daerah	Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing	• Menyusun master plan revitalisasi dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. • Meningkatkan daya tarik destinasi melalui peningkatan kualitas layanan, kebersihan, keamanan, dan atraksi lokal. • Mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah			
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi			
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan	• Mengembangkan kalender event wisata tahunan yang konsisten dan menarik minat wisatawan. • Meningkatkan promosi pariwisata melalui platform digital, media sosial, kerja sama travel agent, dan media.
		Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif	• Mendorong terbentuknya co-working space dan inkubator bisnis ekonomi kreatif di tingkat kota.
		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas	• Mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis komunitas (kuliner, seni, musik, fashion, dll).
		Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata	• Menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha pariwisata dan kreatif.
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	• Menyelenggarakan program inkubasi dan mentoring untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif.
		Fasilitasi akses permodalan dan promosi bagi usaha ekonomi kreatif	• Meningkatkan akses pelaku ekonomi kreatif terhadap pembiayaan, permodalan, dan pasar digital. • Menyelenggarakan event promosi, expo, dan pameran produk ekonomi kreatif lokal secara rutin.

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kota Padang Panjang serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, hal ini sebagai wujud adanya kesinambungan perencanaan pembangunan yang digagas oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang dengan perencanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Keterkaitan antara perencanaan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 memberikan gambaran bahwa penyusunan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sudah sesuai dan dapat mencerminkan terhadap Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang.

BAB IV

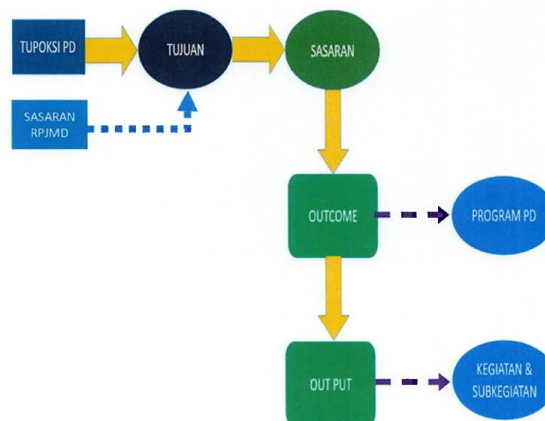
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi dan prinsip efektifitas dan efisiensi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut adalah gambaran / kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Berikut disajikan Teknik perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan		
					Rasio Daya Saing Keolahragaan		
					Rasio PDRB Akomodasi Mamin		
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah					Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan			Jumlah pemuda berwirausaha (orang)		
					Jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan (orang)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya (%)	2.19.02.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya partisipasi dan kapasitas pemuda dalam pembangunan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui Youth center (orang)	2.19.02.2.01 Penyadaran Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan Dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh (Orang) Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01.0016 Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Organisasi)	2.19.02.2.02 Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah keanggotaan pramuka (orang)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan (organisasi)	2.19.04.2.01 Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya prestasi olahraga			Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional		
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (unit)	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.02.0005 Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pada Kejuaraan Tingkat Kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	
				Terlaksananya pembinaan organisasi keolahraagaan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.3.2.03 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan Dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi (Kegiatan)	2.19.03.2.05 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga kreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Olahraga Rekreasi Melalui Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Pengembangan Dan Pengawasan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan Olahraga Dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Yang Berjenjang Dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah Nasional Dan Internasional	
		Meningkatnya pengelolaan pariwisata daerah	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Lama tinggal wisatawan (Hari)		
					Jumlah kunjungan wisatawan (orang)		
					Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terkelolanya destinasi pariwisata sesuai standar	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola sesuai standar (%)	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Jumlah media pemasaran pariwisata (Media)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya kegiatan promosi pemasaran pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pemasaran pariwisata (kegiatan)	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam Dan Luar Negeri	
				Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama Dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri	
				Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pengembangan ekonomi kreatif			Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Prasarana kreatif	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan (unit)	3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif				Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi Dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen laporan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (Dokumen)	3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Dinas PEMuda, Olahraga dan Pariwisata		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda,		Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	2.19..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Olahraga dan Pariwisata				
				Terselenggaranya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah` (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan (%)	2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pelayanan Perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (%)	2.19.01..2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
9				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Berkondisi Baik	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik (%)	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09.0005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan penting yang dijadikan acuan, antara lain:

1. Berpedoman pada RPJMD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 serta Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, melalui pelaksanaan rencana kerja yang mencakup urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
3. Menjawab isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
4. Menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan; serta
5. Menyesuaikan dengan sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 disertai pagu indikatif anggaran yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					10,459,604,674		9,804,378,159		8,013,172,759		7,981,043,370		8,047,798,965		9,056,263,211		53,362,261,138		
T.PORAPAR-1 Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan				Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0.67	1.24		1.56		1.88		2.18		2.47		2.75		2.75	-	Porapar	
				Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.56	0.96		1.06		1.15		1.24		1.33		1.41		1.41	-	Porapar	
				Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	16.03%	29.70%		30%		31.48%		32.14%		32.76%		32.88%		32.88%	-	Porapar	
				Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	2.89	2.94		2.998		3.056		3.114		3.172		3.23		3.23	-	Porapar	
				Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5.1	5.38		5.6		5.82		6.03		6.15		6.26		6.26	-	Porapar	
	S.PORAPAR-1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	68.9	69.19		71.29		73.38		75.48		77.57		79.67		79.67	-	Porapar	
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5,647,974,568		5,839,418,809		4,398,213,409		4,366,084,020		4,382,839,615		4,392,037,892	0	29,026,568,313	Porapar	
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					5,315,461,618		4,999,418,909				3,556,084,120		3,562,839,715		3,582,037,992	0	21,015,842,354	Porapar	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	%	100	100	5,315,461,618	100	4,999,418,909	100	3,578,213,509	100	3,556,084,120	100	3,562,839,715	100	3,582,037,992	100	24,594,055,863	Porapar	
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,738,007,155		3,721,280,000		2,330,074,600		2,282,945,211		2,289,700,806		2,308,899,083		16,670,906,855	Porapar	
			Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	3,738,007,155	100	3,721,280,000	100	2,330,074,600	100	2,282,945,211	100	2,289,700,806	100	2,308,899,083	100		Porapar	
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	412	384	3,738,007,155	406	3,690,200,000	406	2,298,994,600	406	2,251,865,211	406	2,258,620,806	406	2,277,819,083	2394	16,515,506,855	Porapar	
		2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	-	-	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	60	155,400,000	Porapar	
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-		-		-		25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKE- GIATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN N. PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100		-		-		-	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	Porapar	
		2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	28	-	-	-	-		-	28	25,000,000	28	25,000,000	28	25,000,000	84	75,000,000	Porapar	
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					134,863,940	134,000,000	134,000,000		134,000,000		134,000,000		134,000,000		134,000,000		804,863,940	Porapar	
			Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	134,863,940	100	134,000,000	100	134,000,000	100	134,000,000	100	134,000,000	100	134,000,000	100	804,863,940	Porapar	
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	11,920,720	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	24	61,920,720	Porapar	
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	28,919,470	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	24	148,919,470	Porapar	
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	20,999,750	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	72	120,999,750	Porapar	
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	50	73,024,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	300	473,024,000	Porapar	
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					28,184,300	4,927,000	4,927,000		4,927,000		4,927,000		4,927,000		4,927,000		52,819,300	Porapar	
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	28,184,300	100	4,927,000	100	4,927,000	100	4,927,000	100	4,927,000	100	4,927,000	100	52,819,300	Porapar	
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	1	4,619,100	1	2,419,100	1	2,419,100	1	2,419,100	1	2,419,100	1	2,419,100	6	16,714,600	Porapar	
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	23,565,200	1	2,507,900	1	2,507,900	1	2,507,900	1	2,507,900	1	2,507,900	8	36,104,700	Porapar	
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,248,417,423	985,711,909	985,711,909		985,711,909		985,711,909		985,711,909		985,711,909		6,176,976,968	Porapar	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	100	1,248,417,423	100	985,711,909	100	985,711,909	100	985,711,909	100	985,711,909	100	985,711,909	100	6,176,976,968	Porapar	
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12	2,997,400	12	2,200,000	12	2,200,000	12	2,200,000	12	2,200,000	12	2,200,000	72	13,997,400	Porapar	
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36	114,765,000	36	90,000,000	36	90,000,000	36	90,000,000	36	90,000,000	36	90,000,000	216	564,765,000	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKE GIATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARA N PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,130,655,023	12	893,511,909	12	893,511,909	12	893,511,909	12	893,511,909	12	893,511,909	72	5,598,214,568	Porapar	
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165,988,800		153,500,000		123,500,000		123,500,000		123,500,000		123,500,000		813,488,800	Porapar	
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang berondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik	%	100	100	165,988,800	100	153,500,000	100	123,500,000	100	123,500,000	100	123,500,000	100	123,500,000	100	813,488,800	Porapar	
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	8	79,464,000	1	52,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	171,964,000	Porapar	
		2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	6	0	0	6	30,000,000	6	42,500,000	6	42,500,000	6	42,500,000	6	42,500,000	30	200,000,000	Porapar	
		2.19.02.3.05.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	4,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	30	9,000,000	Porapar	
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	32,552,800	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	120	132,552,800	Porapar	
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	49,972,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	18	299,972,000	Porapar	
		S.PORAPAR-2 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan		jumlah pemuda berwirausaha	orang	146	206		266		326		386		446		506		2136		Porapar	
				jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	83	160		180		200		220		240		260		260		Porapar	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN					232,512,950		739,999,900		769,999,900		759,999,900		769,999,900		759,999,900		4,032,512,450	Porapar	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang diasilitasi peningkatan kapasitasnya	%	0,55%	0,72%	232,512,950	0,76%	739,999,900	0,81%	769,999,900	0,85%	759,999,900	0,89%	769,999,900	0,92%	759,999,900	0,92%	4,032,512,450	Porapar	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					132,512,950		739,999,900		759,999,900		759,999,900		759,999,900		759,999,900		3,912,512,450	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKE GIATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARA N PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan kepada pemuda melalui youth center	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui youth center	Orang	90	90	132,512,950	90	739,999,900	90	759,999,900	90	759,999,900	90	759,999,900	90	759,999,900	540	3,912,512,450	Porapar	
		2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	0	0	-	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	Porapar	
		2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	30	30	71,465,900	30	64,999,800	30	64,999,800	30	64,999,800	30	64,999,800	30	64,999,800	180	396,464,900	Porapar	
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	0	-	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Porapar	
		2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	0	-	-	-	-	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	12	20,000,000	Porapar	
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	30	30	61,047,050	30	75,000,100	30	75,000,100	30	75,000,100	30	75,000,100	30	75,000,100	180	436,047,550	Porapar	
		2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengfokalan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1	-	-	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	5	3,000,000,000	Porapar	
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,000,000		-		10,000,000		-		10,000,000		-		120,000,000	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKE GIATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARA N,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Terlaksananya fasilitas dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	1	100,000,000		-	1	10,000,000		-	1	10,000,000		-		120,000,000	Porapar	
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi		1	100,000,000		-	1	10,000,000			1	10,000,000		-		120,000,000	Porapar	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					100,000,000		100,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		400,000,000	Porapar	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah keanggotaan pramuka	Orang	12664	12714	100,000,000	12764	100,000,000	12814	50,000,000	12864	50,000,000	12914	50,000,000	12964	50,000,000		400,000,000	Porapar	
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					100,000,000		100,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		400,000,000	Porapar	
			Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Organisasi	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	400,000,000	Porapar	
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	400,000,000	Porapar	
	S.PORAPAR-3 Meningkatnya prestasi Olah Raga			Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional disarankan : jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional	orang angka	42	75		78		85		90		95		97		97	-	Porapar	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KEOLAHRAGAAN					3,236,038,336		1,014,595,000		664,595,000		664,595,000		664,595,000		664,595,000	0	6,908,013,336	Porapar	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	%	53,44%	57,54	3,236,038,336	57,69	1,014,595,000	59,26	664,595,000	60,71	664,595,000	62,07	664,595,000	64,41	664,595,000	63,33	6,908,013,336	Porapar	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota					1,410,769,446		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		2,410,769,446	Porapar	
			Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1	1	1,410,769,446	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	6	2,410,769,446	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKE GIATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARA N PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.19.03.2.02.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	4	4	1,410,769,446	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	24	2,410,769,446	Porapar	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					332,188,000		49,995,000		49,995,000		49,995,000		49,995,000		49,995,000		582,163,000	Porapar	
			Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	2	17	332,188,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	42	582,163,000	Porapar	
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	17	332,188,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	42	582,163,000	Porapar	
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kesringan kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	400	400	-	-	-		-		-		-		-		-	Porapar	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					402,486,500		400,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		1,002,486,500	Porapar	
			Terlaksananya pembinaan organisasi keolahragaan	Jumlah pembinaan organisasi keolahragaan	organisasi	1	1	402,486,500	1	400,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	30	1,002,486,500	Porapar	
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	200	200	402,486,500	200	400,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000		1,002,486,500	Porapar	
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					1,090,594,390		364,600,000		364,600,000		364,600,000		364,600,000		364,600,000		2,913,594,390	Porapar	
			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan	2	2	1,090,594,390	2	364,600,000	2	364,600,000	2	364,600,000	2	364,600,000	2	364,600,000		2,913,594,390	Porapar	
		2.19.03.2.05.0009	Penyediaan sarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termantapkan	Unit	3	3	716,814,290	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	13	1,341,814,290	Porapar	
		2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1	373,780,100	1	239,600,000	1	239,600,000	1	239,600,000	1	239,600,000	1	239,600,000	6	1,571,780,100	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN (PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	S.PORAPAR-4 Meningkatnya pengelolaan Pariwisata daerah			Jumlah kunjungan wisatawan	orang (ribu)	600	660		720		780		840		920		1.000		1000	-	Porapar	
				Lama tinggal wisatawan	hari	1.02	1.03		1.04		1.05		1.06		1.07		1.08		1.08	-	Porapar	
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1,575,591,770		2,950,364,350		2,950,364,350		2,950,364,350		3,000,364,350		3,999,630,319	0	17,426,679,489	Porapar	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					541,673,470		1,680,000,350		1,680,000,350		1,680,000,350		1,730,000,350		2,680,000,350		9,991,675,220	Porapar	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	15157	16673	541,673,470	18340	1,680,000,350	20174	1,680,000,350	22191	1,680,000,350	24411	1,730,000,350	26852	2,680,000,350	128641	9,991,675,220	Porapar	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					541,673,470		1,680,000,350		1,680,000,350		1,680,000,350		1,730,000,350		2,680,000,350		9,991,675,220	Porapar	
			Terkelolanya destinasi pariwisata sesuai standar	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola sesuai standar	%	80	80	541,673,470	81	1,680,000,350	81.5	1,680,000,350	82	1,680,000,350	83	1,730,000,350	84	2,680,000,350	84	9,991,675,220	Porapar	
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	Lokasi	4	4	117,615,450	2	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	520,000,000	22	717,615,450	Porapar	
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	2	281,520,970	2	1,625,000,000	2	1,625,000,000	2	1,625,000,000	2	1,625,000,000	2	2,125,000,000	12	8,906,520,970	Porapar	
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	63,637,450	1	20,000,050	1	20,000,050	1	20,000,050	1	20,000,050	1	20,000,050	6	163,637,700	Porapar	
		3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1	1	78,899,600	2	15,000,300	1	15,000,300	1	15,000,300	1	15,000,300	1	15,000,300	7	153,901,100	Porapar	
		3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	1	50,000,000	Porapar	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						262,528,150		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		764,348,150	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata	Media	6	7	262,528,150	8	100,364,000	9	100,364,000	10	100,364,000	11	100,364,000	12	100,364,000	49	764,348,150	Porapar	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					262,528,150		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		764,348,150	Porapar	
			Terlaksananya kegiatan promosi pemasaran pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pemasaran pariwisata	Kegiatan	2	2 Kegiatan	262,528,150	2	2 Kegiatan	2	100,364,000	2	100,364,000	2	100,364,000	2	100,364,000	2	764,348,150	Porapar	
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0 Dokumen	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	Porapar	
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	1 Dokumen	32,016,000	1	37,544,000	1	37,544,000	1	37,544,000	1	37,544,000	1	37,544,000	5	219,736,000	Porapar	
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	7	2 Kegiatan	230,512,150	1	52,820,000	1	52,820,000	1	52,820,000	1	52,820,000	1	52,820,000	5	494,612,150	Porapar	
		S.PORAPAR-S. Pengembangan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	4.35	5		5.56		6.02		6.38		6.67		6.88		6.88	-	Porapar	
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		%			44,175,000		40,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	0.00%	204,175,000	Porapar	
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	35.00%	9.52%	44,175,000	9.77%	40,000,000	9.93%	30,000,000	10%	30,000,000	10.63%	30,000,000	11.70%	30,000,000	11.70%	204,175,000	Porapar	
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berkolaborasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Inovasi Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					30,000,000		20,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		90,000,000	Porapar	
			Tersedianya prasarana kreatif	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	Unit	10	8	30,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	90,000,000	Porapar	
		3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	10	8	30,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	90,000,000	Porapar	
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					14,175,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		114,175,000	Porapar	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKE- GIATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARA N,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KET
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Dokumen	30	1	14,175,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	114,175,000	Porapar	
		3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendidikan Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan ide Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	30	50	14,175,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	300	114,175,000	Porapar	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					727,215,150		1,130,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000		1,189,265,969	0.00%	6,466,481,119	Porapar	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	83.33%	84.13%	727,215,150	84.21%	1,130,000,000	84.40%	1,140,000,000	84.67%	1,140,000,000	85.63%	1,140,000,000	85.96%	1,189,265,969	85.96%	6,466,481,119	Porapar	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					700,030,200		1,130,000,000		1,130,000,000		1,130,000,000		1,130,000,000		1,179,265,969		6,399,296,169	Porapar	
			Terlaksananya fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	700,030,200	1	1,130,000,000	1	1,130,000,000	1	1,130,000,000	1	1,130,000,000	1	1,179,265,969	6	6,399,296,169	Porapar	
		3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	663,280,500	1	1,120,000,000	1	1,120,000,000	1	1,120,000,000	1	1,120,000,000	1	1,169,265,969	6	6,312,546,469	Porapar	
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	2	36,749,700	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	152	86,749,700	Porapar	
		3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	60	50,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	50,000,000		
		3.26.06.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					27,184,950		-		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		67,184,950	Porapar	
			Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah dokumen laporan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	1	1	27,184,950		-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	67,184,950	Porapar	
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	50	27,184,950		-	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	130	67,184,950	Porapar	

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA					10,459,604,674		9,804,378,159		8,013,172,759		7,981,043,370		8,047,798,965		9,056,263,211		53,362,261,138	
T.PORAPAR-1 Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan , serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan				Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0.67	1.24		1.56		1.88		2.18		2.47		2.75		2.75	-	Porapar
				Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.56	0.96		1.06		1.15		1.24		1.33		1.41		1.41	-	Porapar
				Rasio Daya Saing Olahraga	%	16,03	29,76		30		31,48		32,14		32,76		32,88		32,88	-	Porapar
				Rasio PORB Akomodasi Mamin	%	2.89	2.94		2.998		3.056		3.114		3.172		3.23		3.23	-	Porapar
				Rasio PORB Ekonomi Kreatif	%	5.1	5.38		5.6		5.82		6.03		6.15		6.26		6.26	-	Porapar
	S.PORAPAR-1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	68.9	69.19		71.29		73.38		75.48		77.57		79.67		79.67	-	Porapar
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5,647,974,568		5,839,418,809		4,398,213,409		4,366,084,020		4,382,839,615		4,392,037,892	0	29,026,568,313	Porapar
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOT A					5,315,461,618		4,999,418,909		3,578,213,509		3,556,084,120		3,562,839,715		3,582,037,992	0	24,594,055,863	Porapar
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	%	100	100	5,315,461,618	100	4,999,418,909	100	3,578,213,509	100	3,556,084,120	100	3,562,839,715	100	3,582,037,992	100	24,594,055,863	Porapar

2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,738,007,155		3,721,280,000		2,330,074,600		2,282,945,211		2,289,700,806		2,308,899,083		16,670,906,855	Porapar
	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	3,738,007,155	100	3,721,280,000	100	2,330,074,600	100	2,282,945,211	100	2,289,700,806	100	2,308,899,083	100		Porapar
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	412	364	3,738,007,155	409	3,690,200,000	409	2,298,994,600	409	2,251,865,211	409	2,258,620,806	409	2,277,819,083	2409	16,515,506,855	Porapar
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	-	-	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	60	155,400,000	Porapar
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-		-		-		25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	Porapar
	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100		-		-		-	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	Porapar
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28	-	-	-	-		-	28	25,000,000	28	25,000,000	28	25,000,000	84	75,000,000	Porapar
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					134,863,940		134,000,000		134,000,000		134,000,000		134,000,000		134,000,000		804,863,940	Porapar
	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	134,863,940	100	134,000,000	100	134,000,000	100	134,000,000	100	134,000,000	100	134,000,000	100	804,863,940	Porapar
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	11,920,720	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	24	61,920,720	Porapar
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	28,919,470	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	24	148,919,470	Porapar
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	20,999,750	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	72	120,999,750	Porapar
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	50	73,024,000	50	80,000,000	24	80,000,000	24	80,000,000	24	80,000,000	24	80,000,000	196	473,024,000	Porapar
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28,184,300		4,927,000		4,927,000		4,927,000		4,927,000		4,927,000		52,819,300	Porapar
	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	28,184,300	100	4,927,000	100	4,927,000	100	4,927,000	100	4,927,000	100	4,927,000	100	52,819,300	Porapar
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	1	4,619,100	1	2,419,100	1	2,419,100	1	2,419,100	1	2,419,100	1	2,419,100	6	16,714,600	Porapar
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	23,565,200	1	2,507,900	1	2,507,900	1	2,507,900	1	2,507,900	1	2,507,900	8	36,104,700	Porapar

2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,248,417,423		985,711,909		985,711,909		985,711,909		985,711,909		985,711,909		6,176,976,968	Porapar
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	100	1,248,417,423	100	985,711,909	100	985,711,909	100	985,711,909	100	985,711,909	100	985,711,909	100	6,176,976,968	Porapar
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12	2,997,400	12	2,200,000	12	2,200,000	12	2,200,000	12	2,200,000	12	2,200,000	72	13,997,400	Porapar
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36	114,765,000	36	90,000,000	36	90,000,000	36	90,000,000	36	90,000,000	36	90,000,000	216	564,765,000	Porapar
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,130,655,023	12	893,511,909	12	893,511,909	12	893,511,909	12	893,511,909	12	893,511,909	72	5,598,214,568	Porapar
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165,988,800		153,500,000		123,500,000		123,500,000		123,500,000		123,500,000		813,488,800	Porapar
	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang ber kondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	%	100	100	165,988,800	100	153,500,000	100	123,500,000	100	123,500,000	100	123,500,000	100	123,500,000	100	813,488,800	Porapar
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	8	79,464,000	1	52,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	171,964,000	Porapar
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	0	0	6	30,000,000	1	42,500,000	1	42,500,000	1	42,500,000	1	42,500,000	10	200,000,000	Porapar
2.19.02.3.05.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	4,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	30	9,000,000	Porapar
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	32,552,800	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	120	132,552,800	Porapar
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	49,972,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	18	299,972,000	Porapar
S.PORAPAR-2 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		jumlah pemuda berwirausaha	orang	146	206		266		326		386		446		506		506	-	Porapar
		jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	83	160		180		200		220		240		260		260	-	Porapar
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					232,512,950		739,999,900		769,999,900		759,999,900		769,999,900		759,999,900		4,152,512,450	Porapar

	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	%	0,55	0,72	232,512,950	0,76	739,999,900	0,81	769,999,900	0,85	759,999,900	0,89	769,999,900	0,92	759,999,900	0,92	4,152,512,450	Porapar
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					132,512,950		739,999,900		759,999,900		759,999,900		759,999,900		759,999,900		3,912,512,450	Porapar
	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pembekalan kekepokoran dan kewirausahaan kepada pemuda melalui youth center	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kekepokoran dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui youth center	Orang	90	90	132,512,950	90	739,999,900	90	759,999,900	90	759,999,900	90	759,999,900	90	759,999,900	540	3,912,512,450	Porapar
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	0	0	-	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	Porapar
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	30	30	71,465,900	30	64,999,800	30	64,999,800	30	64,999,800	30	64,999,800	30	64,999,800	180	396,464,900	Porapar
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepekokoran dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	0	0	-	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Porapar
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	0	0	-	0	-	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	12	20,000,000	Porapar
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepekokoran Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepekokoran Pemuda	Orang	30	30	61,047,050	30	75,000,100	30	75,000,100	30	75,000,100	30	75,000,100	30	75,000,100	180	436,047,550	Porapar
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Pasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah pasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1	0	-	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	5	3,000,000,000	Porapar

		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000		-		10,000,000		-		10,000,000		-		120,000,000	Porapar	
			Terlaksananya fasilitas dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	1	100,000,000	0	-	1	10,000,000		-	1	10,000,000		-	3	120,000,000	Porapar
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi		1	100,000,000	0	-	1	10,000,000			1	10,000,000		-	3	120,000,000	Porapar
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				100,000,000		100,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		400,000,000	Porapar	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah keanggotaan pramuka	Orang	12664	12714	100,000,000	12764	100,000,000	12814	50,000,000	12864	50,000,000	12914	50,000,000	12964	50,000,000	12964	400,000,000	Porapar
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				100,000,000		100,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		400,000,000	Porapar	
			Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Organisasi	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	400,000,000	Porapar
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	400,000,000	Porapar
		S.PORAPAR-3 Meningkatkan prestasi Olah Raga			Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional	Prestasi	42	75		78		85		90		95		97		97	Porapar
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				3,236,038,336		1,014,595,000		664,595,000		664,595,000		664,595,000		664,595,000		6,909,013,336	Porapar	

	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	%	53,44	57,54	3,236,038,336	57.69	1,014,595,000	59.26	664,595,000	60.71	664,595,000	62.07	664,595,000	64,41	664,595,000	64,41	6,909,013,336	Porapar
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota					1,410,769,446		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		2,410,769,446	Porapar
	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1	1	1,410,769,446	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	6	2,410,769,446	Porapar
2.19.03.2.02.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	4	4	1,410,769,446	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	24	2,410,769,446	Porapar
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					332,188,000		49,995,000		49,995,000		49,995,000		49,995,000		49,995,000		582,163,000	Porapar
	Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	2	17	332,188,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	42	582,163,000	Porapar
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	17	332,188,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	5	49,995,000	42	582,163,000	Porapar
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	Orang	400	400	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	400	-	Porapar
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					402,486,500		400,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		1,002,486,500	Porapar
	Terlaksananya pembinaan organisasi keolahragaan	Jumlah pembinaan organisasi keolahragaan	organisasi	1	1	402,486,500	1	400,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	30	1,002,486,500	Porapar

	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	200	200	402,486,500	200	400,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	600	1,002,486,500	Porapar
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					1,090,594,390		364,600,000		364,600,000		364,600,000		364,600,000		364,600,000		2,913,594,390	Porapar
		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan	2	2	1,090,594,390	2	364,600,000	2	364,600,000	2	364,600,000	2	364,600,000	2	364,600,000	12	2,913,594,390	Porapar
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termantfaatkan	Unit	3	3	716,814,290	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	13	1,341,814,290	Porapar
	2.19.03.2.05.0010	Pemasaran olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1	373,780,100	1	239,600,000	1	239,600,000	1	239,600,000	1	239,600,000	1	239,600,000	6	1,571,780,100	Porapar
	S.PORAPAR-4 Meningkatkan pengelolaan Pariwisata daerah		Jumlah kunjungan wisatawan	orang	600,000	660,000		720,000		780,000		840,000		920,000		1,000,000		1,000,000	-	Porapar
			Lama tinggal wisatawan	Hari	1.02	1.03		1.04		1.05		1.06		1.07		1.08		1.08	-	Porapar
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1,575,591,770		2,950,364,350		2,950,364,350		2,950,364,350		3,000,364,350		3,999,630,319	0	17,426,679,489	Porapar
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					541,673,470		1,680,000,350		1,680,000,350		1,680,000,350		1,730,000,350		2,680,000,350		9,991,675,220	Porapar
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	15157	16673	541,673,470	18340	1,680,000,350	20174	1,680,000,350	22191	1,680,000,350	24411	1,730,000,350	26852	2,680,000,350	128641	9,991,675,220	Porapar
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					541,673,470		1,680,000,350		1,680,000,350		1,680,000,350		1,730,000,350		2,680,000,350		9,991,675,220	Porapar
		Terkelolanya destinasi pariwisata sesuai standar	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola sesuai standar	%	NA	80	541,673,470	81	1,680,000,350	81.5	1,680,000,350	82	1,680,000,350	83	1,730,000,350	84	2,680,000,350	84	9,991,675,220	Porapar
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	4	117,615,450	2	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	520,000,000	22	717,615,450	Porapar
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	2	281,520,970	2	1,625,000,000	2	1,625,000,000	2	1,625,000,000	2	1,625,000,000	2	2,125,000,000	12	8,906,520,970	Porapar

3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	63,637,450	1	20,000,050	1	20,000,050	1	20,000,050	1	20,000,050	1	20,000,050	6	163,637,700	Porapar
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menetapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1	1	78,899,600	2	15,000,300	1	15,000,300	1	15,000,300	1	15,000,300	1	15,000,300	7	153,901,100	Porapar
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	1	50,000,000	Porapar
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					262,528,150		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		764,348,150	Porapar
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata	Media	6	7	262,528,150	8	100,364,000	9	100,364,000	10	100,364,000	11	100,364,000	12	100,364,000	57	764,348,150	Porapar
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					262,528,150		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		100,364,000		764,348,150	Porapar
	Terlaksananya kegiatan promosi pemasaran pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pemasaran pariwisata	Kegiatan	2	2	262,528,150	2	100,364,000	2	100,364,000	2	100,364,000	2	100,364,000	2	100,364,000	12	764,348,150	Porapar
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0 Dokumen	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	Porapar
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	1 Dokumen	32,016,000	1	37,544,000	1	37,544,000	1	37,544,000	1	37,544,000	1	37,544,000	5	219,736,000	Porapar
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	7	2 Kegiatan	230,512,150	1	52,820,000	1	52,820,000	1	52,820,000	1	52,820,000	1	52,820,000	5	494,612,150	Porapar
S.PORAPAR-5. Pengembangan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	4.35	5	5.56		6.02		6.38		6.67		6.88		6.88	-		Porapar
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					44,175,000		40,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		204,175,000	Porapar
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	35.00%	9.52%	44,175,000	9.77%	40,000,000	9.93%	30,000,000	10%	30,000,000	10.63%	30,000,000	11.70%	30,000,000	11.70%	204,175,000	Porapar
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berkreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					30,000,000		20,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		90,000,000	Porapar

	Tersedianya prasarana kreatif	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	Unit	10	8	30,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	90,000,000	Porapar
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	10	8	30,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	13	90,000,000	Porapar
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					14,175,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		114,175,000	Porapar
	Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	dokumen	130	25	14,175,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	150	114,175,000	Porapar
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	130	25	14,175,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	150	114,175,000	Porapar
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					727,215,150		1,130,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000		1,189,265,969	0.00%	6,533,666,069	Porapar
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	83.33%	84.13%	727,215,150	84.21 %	1,130,000,000	84.40%	1,140,000,000	84.67%	1,140,000,000	85.63%	1,140,000,000	85.96%	1,189,265,969	85.96%	6,533,666,069	Porapar
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					700,030,200		1,130,000,000		1,130,000,000		1,130,000,000		1,130,000,000		1,179,265,969		6,399,296,169	Porapar
	Terlaksananya fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	700,030,200	1	1,130,000,000	1	1,130,000,000	1	1,130,000,000	1	1,130,000,000	1	1,179,265,969	6	6,399,296,169	Porapar
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	663,280,500	1	1,120,000,000	1	1,120,000,000	1	1,120,000,000	1	1,120,000,000	1	1,169,265,969	6	6,312,546,469	Porapar
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	2	36,749,700	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	152	86,749,700	Porapar
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Porapar
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					27,184,950		-		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	0	67,184,950	Porapar

			Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah dokumen laporan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	1	1	27,184,950	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	67,184,950	Porapar
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	50	27,184,950	-	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	130	67,184,950	Porapar	

Dari tabel diatas sudah tercantum rencana program, kegiatan dan subkegiatan dan pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 sudah selaras dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2025.

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Renstra Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Padang Panjang Youth Center

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten/kota	Inkubasi Wirausaha Muda Melalui Program Pendampingan Usaha Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan
3	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub kegiatan : Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Event Pacu Kuda Tahunan
4	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Pembinaan Atlet Beprestasi

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Sirkuit Balap
6	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Revitalisasi PDIKM
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Padang Panjang Mini Zoo
8	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Home stay naik kelas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
9	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabkota Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan LN Pariwisata Kab/kota	Padang Panjang Semarak Festival
10	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Kegiatan : Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota Sub kegiatan : pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Padang Panjang Kreatif Hub

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki program unggulan daerah yaitu : 1) Padang Panjang Youth centre, 2) Inkubasi Wirausaha Muda Melalui Program Pendampingan Usaha Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan, 3) Event Pacu kuda tahunan, 4) Pembinaan Atlet Berprestasi, 5) Sirkuit Balap, 6) Revitalisasi PDIKM, 7) Padang Panjang Mini Zoo, 8) Home Stay Naik Kelas, 9) Padang Panjang Semarak Festival, 10) Padang Panjang Kreatif Hub.

Program Prioritas Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan janji kampanye dan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi

realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Jumlah pemuda berwirausaha	orang	206	266	326	386	446	506	
2	Jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	160	180	200	220	240	260	
3	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional	prestasi	75	78	85	90	95	97	
4	Lama tinggal wisatawan	hari	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
5	Jumlah kunjungan wisatawan (dalam ribu)	orang	660	720	780	840	920	1.000	
6	Persentase pelaku ekraf yang berkualitas	%	5,00	5,56	6,02	6,38	6,67	6,88	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	69,19	71,29	73,38	75,48	77,57	79,67	

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki 7 Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2025-2029, berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah Kota Padang Panjang

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama dan program pembangunan daerah. Indikator Kinerja Kunci secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKK dan target capaian periode 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,24	1,56	1,88	2,18	2,47	2,75	
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi	%	0,96	1,06	1,15	1,24	1,33	1,41	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	kepemudaan organisasional kemasyarakatan								
3	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	48,00	50,00	51,85	53,57	55,17	56,67	
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	10 prestasi nasional 34 prestasi provinsi	11 prestasi nasional 35 prestasi provinsi	12 prestasi nasional 36 prestasi provinsi	13 prestasi nasional 37 prestasi provinsi	14 prestasi nasional 38 prestasi provinsi	15 prestasi nasional 40 prestasi provinsi	
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	4 prestasi nasional 6 prestasi provinsi	5 prestasi nasional 7 prestasi provinsi	6 prestasi nasional 8 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 9 prestasi provinsi	
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	
	Urusan Pariwisata								
7	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,58	4,59	4,6	4,7	4,8	5	
8	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	10,05	10,06	10,07	10,08	10,09	10,10	
9	Tingkat hunian akomodasi	%	35,00	37,00	39,00	40,00	43,00	45,00	
10	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,90	2,91	2,92	2,95	2,97	3,00	
11	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	2,44	2,45	2,46	2,47	2,48	2,5	
12	LPE sector akomodasi dan makan minum	%	8,33	8,57	8,77	9	9,39	10	
13	PAD sektor pariwisata	rupiah	2.290.000.000	2.300.000.000	2.320.000.000	2.340.000.000	2.360.000.000	2.380.000.000	
14	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	12	14	15	16	17	18	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
15	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang	152	156,6	161,2	165,8	170,4	175	

Sumber: Disporapar Kota Padang Panjang 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja kunci Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah disusun dengan mengacu pada indikator Kinerja Kunci Daerah (IKD) dan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Penjabaran Renstra dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sehingga mampu mengakomodir

kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi , tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

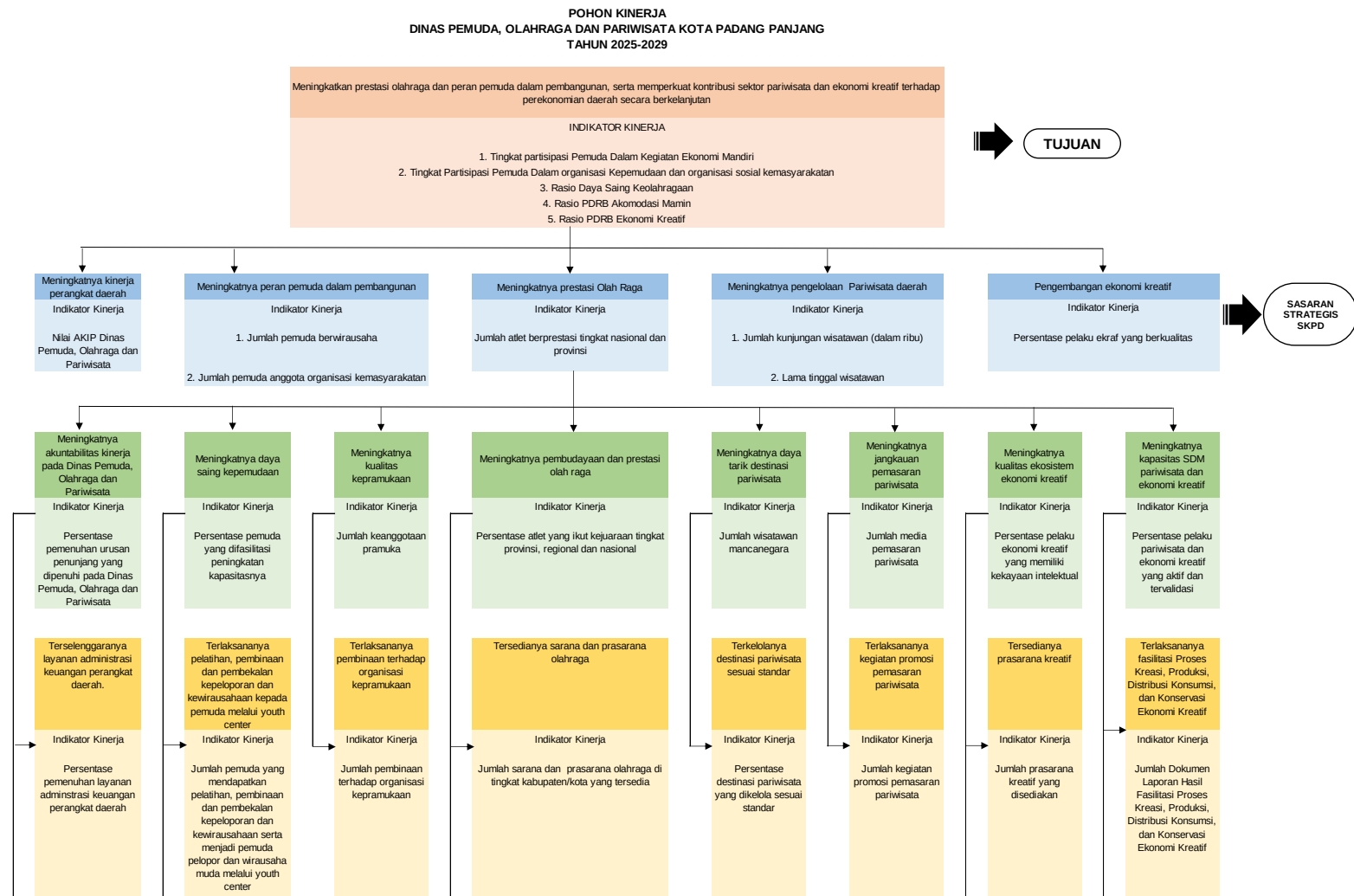
Padang Panjang, September 2025
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

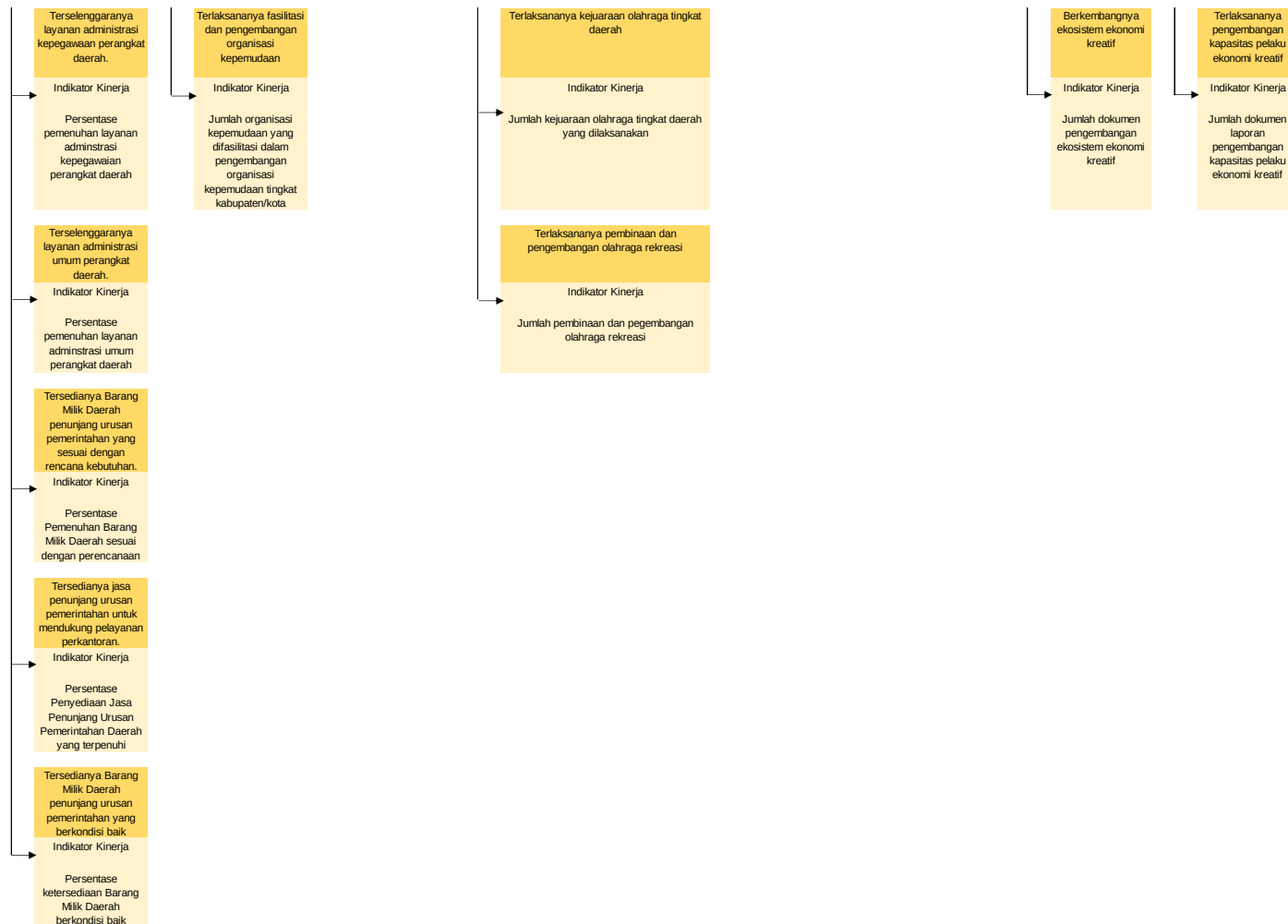
KOTA PADANG PANJANG



NURASRIZAL, ST.MT

Pembina Tk. I NIP. 19770829 200501 1 004





CASCADEING DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029

[illegible]

Meta Data Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

A. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)
Definisi	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	- Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota adalah jumlah pemuda (16-30) tahun pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah kabupaten/kota; - Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota adalah Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi berdasarkan data kependudukan di kabupaten/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dibuktikan dengan dokumen

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)
	pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota.
Sumber Data	• Disporapar Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota • Disdukcapil (Data jumlah total penduduk usia 16–30 tahun berdasarkan administrasi kependudukan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Definisi	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan}}{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persen

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Interpretasi	• Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan adalah Jumlah Pemudausia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. (UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di provinsi yang menjadi pengurus Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; • Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota adalah Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan di kabupaten/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota.

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Sumber Data	- Disporapar Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi soail kemasyarakatan di kabupaten/kota - Disdukcapil (Data jumlah total penduduk usia 16–30 tahun berdasarkan administrasi kependudukan)
Frekuensi	Tahunan

Jumlah pemuda berwirausaha

Nama Indikator	Jumlah pemuda berwirausaaha
Definisi	Jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Rumus Perhitungan	Jumlah Pemuda Berwirausaha = $\sum$ Pemuda usia 16-30 tahun berwirausaha
Satuan Hasil	Orang
Interpretasi	Semakin besar jumlahnya, semakin kuat peran pemuda dalam sektor produktif.
Sumber Data	- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) - Disdukcapil (Data jumlah total penduduk usia 16–30 tahun berdasarkan administrasi kependudukan) - Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Frekuensi	Tahunan

Jumlah pemuda anggota aktif kemasyarakatan

Nama Indikator	Jumlah pemuda anggota aktif kemasyarakatan
Definisi	Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Rumus Perhitungan	Jumlah Pemuda Anggota Aktif = $\sum$ Pemuda usia 16-30 tahun yang aktif organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan
Satuan Hasil	Orang
Interpretasi	Semakin besar jumlahnya, semakin kuat peran pemuda dalam sektor produktif.
Sumber Data	- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) - Disdukcapil (Data jumlah total penduduk usia 16–30 tahun berdasarkan administrasi kependudukan) - Organisasi Kepemudaan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Nama Indikator	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya
Definisi	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya adalah proporsi pemuda yang menerima dukungan program—baik berupa pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, workshop, atau bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas lainnya—dibandingkan dengan total pemuda yang menjadi sasaran dalam periode tertentu.

Nama Indikator	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya}}{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi pemuda yang telah menerima layanan peningkatan kapasitas dibandingkan dengan jumlah pemuda sasaran.
Sumber Data	- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) - Disdukcapil (Data jumlah total penduduk usia 16–30 tahun berdasarkan administrasi kependudukan)
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Nama Indikator	Jumlah keanggotaan pramuka
Definisi	Jumlah keanggotaan Pramuka adalah total peserta didik, pembina, dan anggota lainnya yang terdaftar dalam satu gugus depan (gudep), sekolah, kwartir, atau organisasi Pramuka pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah Keanggotaan = Jumlah Siaga + Jumlah Penggalang + Jumlah Penegak + Jumlah Pandega + Jumlah Pembina Jumlah Keanggotaan=S+P+T+D+B
Satuan Hasil	Orang

Interpretasi	Jumlah keanggotaan Pramuka menggambarkan besar–kecilnya partisipasi peserta didik dan pembina dalam kegiatan kepramukaan pada suatu gugus depan, sekolah, atau kwartir. Semakin besar jumlah anggota, semakin kuat potensi kegiatan, produktivitas, dan dinamika organisasi.
Sumber Data	Kwartir Daerah (Kwarda), Kwartir Cabang (Kwarcab)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Daya Saing Keolahragaan
Definisi	Rasio Daya Saing Keolahragaan adalah indikator yang mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam mencetak prestasi olahraga dibandingkan dengan potensi sumber daya manusianya (jumlah penduduk, jumlah atlet, atau jumlah cabang olahraga yang diikuti). Indikator ini mencerminkan efektivitas pembinaan, fasilitas, serta dukungan terhadap kegiatan keolahragaan.
Rumus Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah atlet berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional})}{\text{Jumlah Atlet}} \times 100\%$ Catatan: Penentuan pembagi (jumlah atlet) disesuaikan dengan fokus analisis dan ketersediaan data.
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Semakin besar nilai Jumlah atlet berprestasi ditingkat provinsi dan nasional, semakin tinggi rasio daya saing olahraga
Sumber Data	• Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) • Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) • Laporan resmi event kejuaraan olahraga • Data dari federasi atau organisasi cabang olahraga terkait
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi
Definisi	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi merupakan total capaian kejuaraan olahraga yang diperoleh oleh individu atau tim pada tingkat nasional dan provinsi dalam periode waktu tertentu, yang dibuktikan dengan perolehan peringkat atau medali (emas, perak, perunggu) dalam ajang resmi yang diselenggarakan oleh lembaga olahraga yang berwenang.
Rumus Perhitungan	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi = Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional + Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi
Satuan Hasil	Orang
Interpretasi	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan provinsi menggambarkan tingkat keberhasilan pembinaan olahraga dalam menghasilkan atlet yang mampu meraih peringkat atau medali pada kejuaraan resmi tingkat provinsi maupun nasional.
Sumber Data	• Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) • Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) • Laporan resmi event kejuaraan olahraga Data dari federasi atau organisasi cabang olahraga terkait
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Nama Indikator	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional
Definisi	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional, dan nasional adalah persentase jumlah atlet binaan yang secara aktif mengikuti dan terdaftar sebagai peserta dalam kejuaraan resmi

Nama Indikator	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional
	tingkat provinsi, regional, atau nasional, dibandingkan dengan total seluruh atlet binaan pada periode pengukuran (misalnya per tahun).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah atlet ikut kejuaraan tingkat tertentu (Provinsi, Regional dan Nasional)}}{\text{Jumlah atlet}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Persentase atlet yang ikut kejuaraan menunjukkan tingkat partisipasi atlet binaan dalam kompetisi resmi. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterlibatan atlet dalam kompetisi, yang merupakan indikator penting keberhasilan pembinaan, kesiapan atlet, serta efektivitas program pelatihan.
Sumber Data	• Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) • Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) • Laporan resmi event kejuaraan olahraga • Data dari federasi atau organisasi cabang olahraga terkait
Frekuensi	Tahunan

B. Urusan Pariwisata

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Penyediaan Akomodasi bagi wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB Penyediaan Akmamin}}{\frac{\text{Nilai tambah Penyediaan Akmamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}}} \times 100 \%$
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Kedepan perlu pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB Regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 sub sector yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif}}{\frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDRB}}} \times 100 \%$

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sector ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB Nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sector ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Lama tinggal wisatawan
Definisi	Lama tinggal wisatawan adalah jumlah rata-rata hari yang dihabiskan oleh wisatawan selama kunjungan mereka di suatu destinasi wisata dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Lama tinggal wisatawan} = \frac{\text{Jumlah total malam kamar}}{\text{Jumlah total pemesanan (atau tamu)}}$
Satuan Hasil	Hari
Interpretasi	• Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa wisatawan menghabiskan waktu lebih lama di destinasi tersebut, yang dapat mencerminkan daya tarik destinasi, ketersediaan atraksi dan fasilitas, serta kepuasan wisatawan. • Nilai yang rendah bisa menjadi indikasi kurangnya atraksi atau fasilitas yang membuat wisatawan bertahan lebih lama. • Indikator ini penting untuk mengukur dampak ekonomi dari pariwisata terhadap wilayah tujuan wisata.

Nama Indikator	Lama tinggal wisatawan
Sumber Data	• Data hotel, penginapan, dan akomodasi lainnya (misalnya dari Badan Pusat Statistik, • Dinas Pariwisata, atau asosiasi perhotelan). • Survei kunjungan wisatawan.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah kunjungan wisatawan
Definisi	Jumlah kunjungan wisatawan adalah banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu daerah atau destinasi dalam periode tertentu, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Rumus Perhitungan	Jumlah kunjungan wisatawan = Jumlah Wisatawan Domestik + Jumlah Wisatawan Mancanegara
Satuan Hasil	Orang
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat daya tarik suatu daerah sebagai destinasi wisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan, semakin besar potensi ekonomi yang bisa diperoleh dari sektor pariwisata, termasuk dampaknya terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan industri kreatif lainnya.
Sumber Data	• Disporapar • Imigrasi (untuk wisatawan mancanegara) • BPS (Badan Pusat Statistik) • Laporan pengelola objek wisata
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Nama Indikator	Jumlah wisatawan mancanegara
Definisi	Jumlah wisatawan mancanegara adalah jumlah individu berkewarganegaraan asing yang masuk ke suatu negara/daerah melalui pintu masuk resmi (bandara, pelabuhan laut, atau pos perbatasan darat) dan tercatat sebagai wisatawan sesuai data imigrasi dalam periode waktu tertentu (misalnya per bulan atau per tahun).
Rumus Perhitungan	Jumlah wisatawan mancanegara $= \sum \text{Wisman yang tercatat selama 1 tahun}$
Satuan Hasil	orang
Interpretasi	Jumlah wisatawan mancanegara adalah indikator kuantitatif kedatangan wisatawan asing ke suatu wilayah dalam periode tertentu. Angka ini menggambarkan: • Popularitas destinasi di mata wisatawan asing • Daya tarik wisatawan internasional • Potensi pendapatan devisa dari sektor pariwisata Semakin tinggi jumlah wisman, semakin besar potensi dampak ekonomi dan promosi destinasi di kancah internasional.
Sumber Data	• Disporapar • Imigrasi (untuk wisatawan mancanegara) • BPS (Badan Pusat Statistik) • Laporan pengelola objek wisata
Frekuensi	Tahunan

Program Pemasaran Pariwisata

Nama Indikator	Jumlah media pemasaran pariwisata
Definisi	Jumlah media pemasaran pariwisata adalah banyaknya jenis atau unit media promosi yang digunakan secara aktif oleh instansi/daerah/organisasi dalam memasarkan pariwisata, yang teridentifikasi, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi dalam periode tertentu (bulanan atau tahunan).
Rumus Perhitungan	Total=(Media Digital)+(Media Cetak)+(Media Outdoor)+(Media Elektronik)+(Media Event) Dengan: Media Digital = jumlah website, akun media sosial aktif, iklan digital, konten digital yang dipublikasikan • Media Cetak = jumlah brosur, booklet, leaflet, majalah, dll. • Media Outdoor = billboard, baliho, spanduk, videotron, poster • Media Elektronik = iklan TV, radio, advertorial • Media Event = booth, banner event, merchandise promosi, materi pameran
Satuan Hasil	Media
Interpretasi	Jumlah media pemasaran pariwisata menggambarkan tingkat upaya promosi yang dilakukan suatu instansi, daerah, atau organisasi dalam memasarkan destinasi dan produk pariwisata. Semakin banyak media yang digunakan, semakin luas potensi jangkauan promosi kepada wisatawan.
Sumber Data	1. Laporan internal instansi pariwisata. 2. Catatan digital (website, media sosial, iklan online).

Nama Indikator	Jumlah media pemasaran pariwisata
	3. Catatan cetak dan outdoor. 4. Media elektronik (TV/radio/advertorial). 5. Dokumentasi event promosi. 6. Survei inventarisasi media. 7. Bukti administrasi/pembelian media.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
Definisi	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif adalah perbandingan perubahan jumlah pelaku ekonomi kreatif antara dua periode tertentu terhadap jumlah pelaku pada periode awal, yang dinyatakan dalam persentase.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Tahun ini} - \text{Jumlah Pelaku Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Pelaku Tahun Lalu}} \times 100\%$
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif menunjukkan laju perubahan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari periode sebelumnya ke periode berjalan. • Nilai ini menjadi indikator dinamika sektor kreatif, sejauh mana jumlah pelaku usaha kreatif berkembang, stagnan, atau menurun. • Pertumbuhan yang positif biasanya menandakan adanya peluang ekonomi, dukungan kebijakan, dan minat masyarakat dalam sektor kreatif.
Sumber Data	Dinas Porapar

Nama Indikator	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Nama Indikator	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Definisi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual adalah proporsi pelaku usaha atau individu dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, atau indikasi geografis terhadap total pelaku ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki KI}}{\text{Total Pelaku Ekraf}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki KI: Individu/badan usaha ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat KI aktif • Total Pelaku Ekraf: Seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif yang tercatat aktif di daerah • Jenis KI dapat berupa: hak cipta, merek, paten, desain industri, dll
Satuan Hasil	Persen
Interpretasi	Nilai tinggi berarti tingkat legalitas dan perlindungan karya ekraf meningkat

Nama Indikator	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Sumber Data	- Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Kekayaan Intelektual) - Laporan komunitas ekonomi kreatif / UMKM
Frekuensi	Tahunan (bisa juga semesteran jika data tersedia dari sistem pendaftaran KI online)

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekraf yang Aktif dan Tervalidasi}}{\text{Total Pelaku Terdata}} \times 100\%$ Keterangan : - Pelaku Aktif dan Tervalidasi : Pelaku usaha yang masih menjalankan kegiatan usaha, memiliki identitas yang sah/diverifikasi (NPWP, NIB, izin usaha, atau diverifikasi oleh dinas/komunitas) - Total Pelaku Terdata : Semua pelaku parekraf yang tercatat dalam database daerah/nasional (baik yang aktif maupun tidak aktif)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, berarti data semakin akurat dan usaha parekraf aktif lebih banyak
Sumber Data	- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi/ Kabupaten/Kota - Database Sistem Informasi Industri Kreatif (SIKRIK), Sistem Informasi Kepariwisata

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
	- Asosiasi Pariwisata dan Ekraf (ASITA, PHRI, Bekraf, dll) - Pendataan lapangan, hasil survei atau registrasi ulang pelaku parekraf
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Rumus Perhitungan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah
Satuan Hasil	Angka
Interpretasi	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja dinas . Semakin tinggi nilainya semakin baik dinas tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak kepada masyarakat
Sumber Data	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemenuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD yang memenuhi standar urusan penunjang}}{\text{Total OPD yang memiliki urusan penunjang}} \right) \times$
Satuan Hasil	Persen
	Disporapar

